



**DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU**

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

**KAPUAS HULU!
HEBAT!**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat melaksanakan penyusunan laporan dan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan yang meliputi: pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, utang, dan ekuitas dana serta perhitungannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 dengan sebaik – baiknya.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu berbasis akrual. Di dalam Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Desember 2023.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi asset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023.
3. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu. Semoga laporan keuangan ini dapat memberi manfaat bagi segenap penggunanya.

Putussibau, 29 Desember 2023
Pengguna Anggaran,

ELISABET ROSLIN, S.H, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19671105 199003 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
DASAR PENYUSUNAN	1
TUJUAN PENYUSUNAN	3
PROSEDUR PENYUSUNAN	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	5
LAPORAN REALISISASI ANGGARAN	6-7
PENJABARAN LAPORAN REALISISASI ANGGARAN	8-20
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	21
NERACA	22-23
LAPORAN OPERASIONAL	24-25
IKHTISAR ASET	26
BA PERSEDIAAN	27
BA REKONSILIASI ASET TRIWULAN IV	28-29
FORM REKON ASET.....	30-31
RINCIAN BELANJA MODAL	32
RINCIAN MUTASI	33
RINCIAN PENGHAPUASAN	34
RINCIAN REKLASIFIKASI	35
BUKU INVENTARIS BARANG.....	36
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB A-G)	38-49
DAFTAR PENYUSUTAN	50-60
REKAPITULASI BUKU INVENTARIS ASET LAINNYA.....	61-62
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)	63-106



Pendahuluan

Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia sebagai upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut, hal ini membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik berdasarkan manajemen keuangan daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Prinsip otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang nyata pada pemerintah daerah secara proporsional untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Hak dan kewenangan ini membawa serta pula kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkannya secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun Pemerintah Pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel inilah yang didengungkan sebagai langkah reformasi di bidang keuangan.

Dasar Penyusunan

Berbagai peraturan pemerintah terus menyusul agar dapat dijadikan pedoman dalam penerapan penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah untuk menjamin keseragaman pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah beberapa peraturan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang telah dikeluarkan sampai sekarang :

- a. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- d. PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- f. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Permendagri 79 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Perda 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah
- k. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- l. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka karakteristik suatu pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi lebih nyata bentuknya. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang pada beberapa tahun terakhir ini diharuskan bagi tiap kepala daerah, maupun Kepala SKPD dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai entitas akuntansi tidak terkecuali termasuk didalamnya.

Laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah salah satu dari Laporan Keuangan SKPD yang kemudian akan digabung dengan Laporan Keuangan SKPD lainnya menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Jika laporan keuangan yang disusun oleh Kepala Daerah, terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca Daerah
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Neraca ini diharapkan dapat :

- Menyajikan posisi keuangan *Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu* selama satu periode pelaporan secara relevan, yang memiliki manfaat umpan balik (Feedback Value), mampu



memberikan manfaat prediktif (Prediktive Value), disajikan tepat waktu (Time Lines), dan lengkap (Completness).

- Menyajikan informasi neraca yang handal (reliable) mengenai Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas secara real, verifiability dan netral sehingga dapat menggambarkan kondisi dan struktur keuangan Pemerintah sebenarnya dalam periode pelaporan tersebut.

Prosedur, teknik, metode dan standar akuntansi diterapkan pada penyusunan laporan keuangan ini meliputi dokumentasi, konfirmasi, observasi, ketepatan mekanis, serta melakukan analisis perbandingan dan hubungan yang relevan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sehingga diharapkan membuat semua informasi tersaji secara transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Hal ini berarti bahwa laporan keuangan diharapkan akan disajikan sesuai dengan tujuan.

Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Neraca Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Per 31 Desember 2020 adalah :

- Menyajikan posisi keuangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu per tanggal 31 Desember 2020.
- Menyajikan informasi keuangan yang handal (reliable) mengenai Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas secara real sehingga dapat menggambarkan kondisi dan struktur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

Prosedur Penyusunan

Langkah pertama yang diambil berdasarkan metodologi dan prosedur penyusunan neraca sesuai dengan proses akuntansi adalah merestatement neraca daerah audited per 31 Desember 2020 menjadi Neraca Awal Satuan Perangkat kerja Daerah (SKPD) berbasis akrual penuh pada posisi per 31 desember 2020. Kemudian dilakukan pengumpulan data inventaris barang yang terdiri dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A, Kartu Inventaris Barang (KIB) B, Kartu Inventaris Barang (KIB) C, Kartu Inventaris Barang (KIB) D, dan Kartu Inventaris Barang (KIB) F, serta dokumen pendukung dan bukti autentik lainnya pada setiap SKPD. Semua data yang diperoleh dari tiap SKPD akan di-breakdown menjadi data koreksi untuk tahun 2020 dan data mutasi untuk tahun 2020, sehingga akan terlihat Daftar Aset yang dimiliki SKPD untuk tahun 2020. Langkah berikutnya adalah memasukkan data koreksi tahun 2020 dan data mutasi tahun 2020 tersebut ke dalam format neraca. Sehingga akan



terbentuklah Neraca Awal Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2020, yang menyajikan informasi mengenai nilai Aktiva, nilai Kewajiban, dan nilai Ekuitas yang dimiliki oleh setiap SKPD.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Laporan Perubahan Ekuitas;
- d) Laporan Operasional;
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Putussibau, 29 Desember 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ELISABET ROSLIN, S.H, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19671105 199003 2 010

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SKPD : 2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023 dan 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	7.077.908.586,00	6.737.459.706,00	95,19	6.914.190.048,50
5.1.	BELANJA OPERASI	6.881.608.586,00	6.541.902.226,00	95,06	6.781.343.048,50
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.790.788.016,00	3.457.222.261,00	91,20	3.477.242.937,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.532.705.078,00	2.261.817.061,00	89,30	2.295.192.837,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.862.492.175,00	1.664.720.840,00	89,38	1.698.711.960,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	210.761.648,00	183.391.666,00	87,01	177.979.070,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	98.990.250,00	98.085.000,00	99,09	98.200.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	53.932.500,00	52.650.000,00	97,62	55.080.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	57.096.500,00	45.660.000,00	79,97	46.645.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	112.808.634,00	94.073.580,00	83,39	96.825.540,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.786.990,00	2.779.732,00	99,74	2.314.080,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.286,00	20.673,00	70,59	24.366,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	118.240.947,00	106.768.304,00	90,30	105.490.354,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.891.534,00	3.416.801,00	87,80	3.495.582,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.674.614,00	10.250.465,00	87,80	10.426.885,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.055.962.938,00	999.285.200,00	94,63	943.850.100,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.055.962.938,00	999.285.200,00	94,63	943.850.100,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	202.120.000,00	196.120.000,00	97,03	238.200.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	202.120.000,00	196.120.000,00	97,03	238.200.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.571.820.570,00	2.568.890.724,00	99,89	2.847.994.161,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	490.106.400,00	489.238.550,00	99,82	759.427.800,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	487.557.600,00	486.689.750,00	99,82	759.427.800,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.548.800,00	2.548.800,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	640.128.570,00	638.066.574,00	99,68	692.867.361,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	610.349.000,00	608.467.634,00	99,69	640.068.721,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22.679.570,00	22.498.940,00	99,20	16.028.640,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	11.000.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	21.600.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	4.170.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	120.310.000,00	120.310.000,00	100,00	25.192.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.310.000,00	120.310.000,00	100,00	25.192.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	1.321.275.600,00	1.321.275.600,00	100,00	1.329.307.000,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.321.275.600,00	1.321.275.600,00	100,00	1.329.307.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	41.200.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	41.200.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	519.000.000,00	515.789.241,00	99,38	331.428.450,50
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	519.000.000,00	515.789.241,00	99,38	331.428.450,50
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	135.008.150,50
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	519.000.000,00	515.789.241,00	99,38	196.420.300,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	124.677.500,00
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	124.677.500,00
5.1.06.03.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	124.677.500,00
5.2.	BELANJA MODAL	196.300.000,00	195.557.480,00	99,62	132.847.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	132.847.000,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	39.540.000,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	39.540.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	7.307.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	6.907.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	400.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	-	-	-	86.000.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	-	30.000.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	56.000.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.300.000,00	195.557.480,00	99,62	-
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	196.300.000,00	195.557.480,00	99,62	-
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	196.300.000,00	195.557.480,00	99,62	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.077.908.586,00)	(6.737.459.706,00)	95,19	-

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI,

PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2.07. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

ORGANISASI

:

2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.31.3.32.01.0000 00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.077.908.586,00	6.737.459.706,00	(340.448.880,00)	95,18	
2.07.2.07.3.31.3.32.01.0000 00.00.5.1.01	BELANJA PEGAWAI	3.790.788.016,00	3.457.222.261,00	(333.565.755,00)	91,20	
2.07.2.07.3.31.3.32.01.0000 00.00.5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	2.571.820.570,00	2.568.890.724,00	(2.929.846,00)	99,88	
2.07.2.07.3.31.3.32.01.0000 00.00.5.1.05	BELANJA HIBAH	519.000.000,00	515.789.241,00	(3.210.759,00)	99,38	
2.07.2.07.3.31.3.32.01.0000 00.00.5.2.	BELANJA MODAL	196.300.000,00	195.557.480,00	(742.520,00)	99,62	
2.07.2.07.3.301.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.541.878.886,00	5.205.462.785,00	(336.416.101,00)	93,92	
2.07.2.07.3.301.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	15.933.000,00	15.683.600,00	(249.400,00)	98,43	
2.07.2.07.3.301.2.01.015.1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	15.933.000,00	15.683.600,00	(249.400,00)	98,43	
2.07.2.07.3.301.2.01.015.1. 02.01.	Belanja Barang	15.933.000,00	15.683.600,00	(249.400,00)	98,43	
2.07.2.07.3.301.2.01.015.1. 02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	15.933.000,00	15.683.600,00	(249.400,00)	98,43	
2.07.2.07.3.301.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.759.000,00	4.759.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.301.2.01.025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.759.000,00	4.759.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.025.1.02.01.	Belanja Barang	4.759.000,00	4.759.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.025.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.759.000,00	4.759.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.759.000,00	4.759.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.035.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.759.000,00	4.759.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.035.1.02.01.	Belanja Barang	4.759.000,00	4.759.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.035.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.759.000,00	4.759.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.759.000,00	4.759.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.045.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.759.000,00	4.759.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.045.1.02.01.	Belanja Barang	4.759.000,00	4.759.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.045.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.759.000,00	4.759.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.759.000,00	4.759.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.055.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.759.000,00	4.759.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.055.1.02.01.	Belanja Barang	4.759.000,00	4.759.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.055.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.759.000,00	4.759.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.136.500,00	10.095.100,00	(41.400,00)	99,59	
2.07.2.07.3.301.2.01.065.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.136.500,00	10.095.100,00	(41.400,00)	99,59	
2.07.2.07.3.301.2.01.065.1.02.01.	Belanja Barang	10.136.500,00	10.095.100,00	(41.400,00)	99,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.301.2.01.065.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	10.136.500,00	10.095.100,00	(41.400,00)	99,59	
2.07.2.07.3.301.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	32.330.500,00	32.294.675,00	(35.825,00)	99,88	
2.07.2.07.3.301.2.01.075.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.330.500,00	32.294.675,00	(35.825,00)	99,88	
2.07.2.07.3.301.2.01.075.1.02.01.	Belanja Barang	6.110.500,00	6.074.675,00	(35.825,00)	99,41	
2.07.2.07.3.301.2.01.075.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	6.110.500,00	6.074.675,00	(35.825,00)	99,41	
2.07.2.07.3.301.2.01.075.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	26.220.000,00	26.220.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.01.075.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.220.000,00	26.220.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.588.668.016,00	3.261.102.261,00	(327.565.755,00)	90,87	
2.07.2.07.3.301.2.02.015.1.01.	Belanja Pegawai	3.588.668.016,00	3.261.102.261,00	(327.565.755,00)	90,87	
2.07.2.07.3.301.2.02.015.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.532.705.078,00	2.261.817.061,00	(270.888.017,00)	89,30	
2.07.2.07.3.301.2.02.015.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.862.492.175,00	1.664.720.840,00	(197.771.335,00)	89,38	
2.07.2.07.3.301.2.02.015.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	210.761.648,00	183.391.666,00	(27.369.982,00)	87,01	
2.07.2.07.3.301.2.02.015.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	98.990.250,00	98.085.000,00	(905.250,00)	99,08	
2.07.2.07.3.301.2.02.015.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	53.932.500,00	52.650.000,00	(1.282.500,00)	97,62	
2.07.2.07.3.301.2.02.015.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	57.096.500,00	45.660.000,00	(11.436.500,00)	79,96	
2.07.2.07.3.301.2.02.015.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	112.808.634,00	94.073.580,00	(18.735.054,00)	83,39	
2.07.2.07.3.301.2.02.015.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.786.990,00	2.779.732,00	(7.258,00)	99,73	
2.07.2.07.3.301.2.02.015.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.286,00	20.673,00	(8.613,00)	70,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.301.2.02.015.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	118.240.947,00	106.768.304,00	(11.472.643,00)	90,29	
2.07.2.07.3.301.2.02.015.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.891.534,00	3.416.801,00	(474.733,00)	87,80	
2.07.2.07.3.301.2.02.015.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.674.614,00	10.250.465,00	(1.424.149,00)	87,80	
2.07.2.07.3.301.2.02.015.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.055.962.938,00	999.285.200,00	(56.677.738,00)	94,63	
2.07.2.07.3.301.2.02.015.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.055.962.938,00	999.285.200,00	(56.677.738,00)	94,63	
2.07.2.07.3.301.2.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.02.025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.02.025.1.02.01.	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.02.025.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.02.03	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	196.160.000,00	190.143.750,00	(6.016.250,00)	96,93	
2.07.2.07.3.301.2.02.035.1.01.	Belanja Pegawai	193.960.000,00	187.960.000,00	(6.000.000,00)	96,90	
2.07.2.07.3.301.2.02.035.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	193.960.000,00	187.960.000,00	(6.000.000,00)	96,90	
2.07.2.07.3.301.2.02.035.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	193.960.000,00	187.960.000,00	(6.000.000,00)	96,90	
2.07.2.07.3.301.2.02.035.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.183.750,00	(16.250,00)	99,26	
2.07.2.07.3.301.2.02.035.1.02.01.	Belanja Barang	2.200.000,00	2.183.750,00	(16.250,00)	99,26	
2.07.2.07.3.301.2.02.035.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.200.000,00	2.183.750,00	(16.250,00)	99,26	
2.07.2.07.3.301.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.369.300,00	8.272.975,00	(96.325,00)	98,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.301.2.02.055.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.369.300,00	8.272.975,00	(96.325,00)	98,84	
2.07.2.07.3.301.2.02.055.1.02.01.	Belanja Barang	8.369.300,00	8.272.975,00	(96.325,00)	98,84	
2.07.2.07.3.301.2.02.055.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	8.369.300,00	8.272.975,00	(96.325,00)	98,84	
2.07.2.07.3.301.2.02.06	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	1.500.400,00	1.500.400,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.02.065.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.400,00	1.500.400,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.02.065.1.02.01.	Belanja Barang	1.500.400,00	1.500.400,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.02.065.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.400,00	1.500.400,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	13.934.000,00	13.855.700,00	(78.300,00)	99,43	
2.07.2.07.3.301.2.02.075.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.934.000,00	13.855.700,00	(78.300,00)	99,43	
2.07.2.07.3.301.2.02.075.1.02.01.	Belanja Barang	13.934.000,00	13.855.700,00	(78.300,00)	99,43	
2.07.2.07.3.301.2.02.075.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	13.934.000,00	13.855.700,00	(78.300,00)	99,43	
2.07.2.07.3.301.2.02.08	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.000.000,00	1.995.100,00	(4.900,00)	99,75	
2.07.2.07.3.301.2.02.085.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.995.100,00	(4.900,00)	99,75	
2.07.2.07.3.301.2.02.085.1.02.01.	Belanja Barang	2.000.000,00	1.995.100,00	(4.900,00)	99,75	
2.07.2.07.3.301.2.02.085.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.995.100,00	(4.900,00)	99,75	
2.07.2.07.3.301.2.05.03	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	18.500.000,00	18.420.850,00	(79.150,00)	99,57	
2.07.2.07.3.301.2.05.035.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.420.850,00	(79.150,00)	99,57	
2.07.2.07.3.301.2.05.035.1.02.01.	Belanja Barang	18.500.000,00	18.420.850,00	(79.150,00)	99,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.301.2.05.035.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	18.500.000,00	18.420.850,00	(79.150,00)	99,57	
2.07.2.07.3.301.2.05.05	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	18.500.000,00	18.420.850,00	(79.150,00)	99,57	
2.07.2.07.3.301.2.05.055.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.420.850,00	(79.150,00)	99,57	
2.07.2.07.3.301.2.05.055.1.02.01.	Belanja Barang	18.500.000,00	18.420.850,00	(79.150,00)	99,57	
2.07.2.07.3.301.2.05.055.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	18.500.000,00	18.420.850,00	(79.150,00)	99,57	
2.07.2.07.3.301.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.021.800,00	30.021.800,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.06.015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.021.800,00	30.021.800,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.06.015.1.02.01.	Belanja Barang	30.021.800,00	30.021.800,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.06.015.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	27.473.000,00	27.473.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.06.015.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.548.800,00	2.548.800,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.032.000,00	49.928.150,00	(103.850,00)	99,79	
2.07.2.07.3.301.2.06.025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.032.000,00	49.928.150,00	(103.850,00)	99,79	
2.07.2.07.3.301.2.06.025.1.02.01.	Belanja Barang	50.032.000,00	49.928.150,00	(103.850,00)	99,79	
2.07.2.07.3.301.2.06.025.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	50.032.000,00	49.928.150,00	(103.850,00)	99,79	
2.07.2.07.3.301.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	25.229.000,00	25.229.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.06.035.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.229.000,00	25.229.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.06.035.1.02.01.	Belanja Barang	25.229.000,00	25.229.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.06.035.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	25.229.000,00	25.229.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.301.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	38.079.000,00	38.075.200,00	(3.800,00)	99,99	
2.07.2.07.3.301.2.06.055.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.079.000,00	38.075.200,00	(3.800,00)	99,99	
2.07.2.07.3.301.2.06.055.1.02.01.	Belanja Barang	37.309.000,00	37.305.200,00	(3.800,00)	99,98	
2.07.2.07.3.301.2.06.055.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	37.309.000,00	37.305.200,00	(3.800,00)	99,98	
2.07.2.07.3.301.2.06.055.1.02.02.	Belanja Jasa	770.000,00	770.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.06.055.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	770.000,00	770.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	567.657.400,00	567.657.400,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.06.095.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	567.657.400,00	567.657.400,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.06.095.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	567.657.400,00	567.657.400,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.06.095.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	567.657.400,00	567.657.400,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.08.015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.08.015.1.02.01.	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.08.015.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.08.015.1.02.02.	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.08.015.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	76.029.000,00	74.209.034,00	(1.819.966,00)	97,60	
2.07.2.07.3.301.2.08.025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	76.029.000,00	74.209.034,00	(1.819.966,00)	97,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.301.2.08.025.1.02.02.	Belanja Jasa	76.029.000,00	74.209.034,00	(1.819.966,00)	97,60	
2.07.2.07.3.301.2.08.025.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	76.029.000,00	74.209.034,00	(1.819.966,00)	97,60	
2.07.2.07.3.301.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	608.869.570,00	608.688.940,00	(180.630,00)	99,97	
2.07.2.07.3.301.2.08.045.1.01.	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.08.045.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.160.000,00	8.160.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.08.045.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	8.160.000,00	8.160.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.08.045.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	600.709.570,00	600.528.940,00	(180.630,00)	99,96	
2.07.2.07.3.301.2.08.045.1.02.01.	Belanja Barang	52.680.000,00	52.680.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.08.045.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	52.680.000,00	52.680.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.08.045.1.02.02.	Belanja Jasa	548.029.570,00	547.848.940,00	(180.630,00)	99,96	
2.07.2.07.3.301.2.08.045.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	521.750.000,00	521.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.08.045.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22.679.570,00	22.498.940,00	(180.630,00)	99,20	
2.07.2.07.3.301.2.08.045.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.09.01	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	170.204.400,00	170.204.400,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.09.015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	170.204.400,00	170.204.400,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.09.015.1.02.01.	Belanja Barang	75.704.400,00	75.704.400,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.09.015.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	75.704.400,00	75.704.400,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.301.2.09.015.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	94.500.000,00	94.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.09.015.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94.500.000,00	94.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	8.850.000,00	8.788.600,00	(61.400,00)	99,30	
2.07.2.07.3.301.2.09.025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	8.788.600,00	(61.400,00)	99,30	
2.07.2.07.3.301.2.09.025.1.02.02.	Belanja Jasa	8.850.000,00	8.788.600,00	(61.400,00)	99,30	
2.07.2.07.3.301.2.09.025.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	8.850.000,00	8.788.600,00	(61.400,00)	99,30	
2.07.2.07.3.301.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	36.839.000,00	36.839.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.09.065.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.839.000,00	36.839.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.09.065.1.02.01.	Belanja Barang	11.029.000,00	11.029.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.09.065.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	11.029.000,00	11.029.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.09.065.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	25.810.000,00	25.810.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.09.065.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.810.000,00	25.810.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.303.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	42.988.900,00	42.988.900,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.303.2.01.02	KOORDINASI LINTAS LEMBAGA DAN KERJA SAMA DENGAN SEKTOR SWASTA UNTUK PENYEDIAAN INSTRUKTUR SERTA SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA	30.132.400,00	30.132.400,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.303.2.01.025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.132.400,00	30.132.400,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.303.2.01.025.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	30.132.400,00	30.132.400,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.303.2.01.025.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.132.400,00	30.132.400,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.303.2.02.01	PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	12.856.500,00	12.856.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.303.2.02.015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.856.500,00	12.856.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.303.2.02.015.1.02.01.	Belanja Barang	4.156.500,00	4.156.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.303.2.02.015.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.156.500,00	4.156.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.303.2.02.015.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.303.2.02.015.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.304.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	18.036.500,00	18.036.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.304.2.01.02	PELAYANAN ANTAR KERJA	18.036.500,00	18.036.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.304.2.01.025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.036.500,00	18.036.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.304.2.01.025.1.02.01.	Belanja Barang	10.856.500,00	10.856.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.304.2.01.025.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	10.856.500,00	10.856.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.304.2.01.025.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	7.180.000,00	7.180.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.304.2.01.025.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.180.000,00	7.180.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	38.975.000,00	38.975.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.2.02.01	PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.614.000,00	24.614.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.2.02.015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.614.000,00	24.614.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.2.02.015.1.02.01.	Belanja Barang	6.804.000,00	6.804.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.305.2.02.015.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	6.804.000,00	6.804.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.2.02.015.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	17.810.000,00	17.810.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.2.02.015.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.810.000,00	17.810.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.2.02.02	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.361.000,00	14.361.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.2.02.025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.361.000,00	14.361.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.2.02.025.1.02.01.	Belanja Barang	4.246.000,00	4.246.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.2.02.025.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.246.000,00	4.246.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.2.02.025.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	10.115.000,00	10.115.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.305.2.02.025.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.115.000,00	10.115.000,00	-	100,00	
3.31.2.07.3.302.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.075.938.700,00	1.071.921.171,00	(4.017.529,00)	99,62	
3.31.2.07.3.302.2.01.04	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	675.938.700,00	673.956.800,00	(1.981.900,00)	99,70	
3.31.2.07.3.302.2.01.045.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	348.138.700,00	348.112.550,00	(26.150,00)	99,99	
3.31.2.07.3.302.2.01.045.1.02.01.	Belanja Barang	30.907.500,00	30.881.350,00	(26.150,00)	99,91	
3.31.2.07.3.302.2.01.045.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	30.907.500,00	30.881.350,00	(26.150,00)	99,91	
3.31.2.07.3.302.2.01.045.1.02.02.	Belanja Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
3.31.2.07.3.302.2.01.045.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
3.31.2.07.3.302.2.01.045.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	313.731.200,00	313.731.200,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.31.2.07.3.302.2.01.045.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	313.731.200,00	313.731.200,00	-	100,00	
3.31.2.07.3.302.2.01.045.1.05.	Belanja Hibah	327.800.000,00	325.844.250,00	(1.955.750,00)	99,40	
3.31.2.07.3.302.2.01.045.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	327.800.000,00	325.844.250,00	(1.955.750,00)	99,40	
3.31.2.07.3.302.2.01.045.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	327.800.000,00	325.844.250,00	(1.955.750,00)	99,40	
3.31.2.07.3.302.2.01.05	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	400.000.000,00	397.964.371,00	(2.035.629,00)	99,49	
3.31.2.07.3.302.2.01.055.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.461.900,00	(38.100,00)	99,69	
3.31.2.07.3.302.2.01.055.1.02.01.	Belanja Barang	3.800.000,00	3.761.900,00	(38.100,00)	98,99	
3.31.2.07.3.302.2.01.055.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.800.000,00	3.761.900,00	(38.100,00)	98,99	
3.31.2.07.3.302.2.01.055.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
3.31.2.07.3.302.2.01.055.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
3.31.2.07.3.302.2.01.055.1.05.	Belanja Hibah	191.200.000,00	189.944.991,00	(1.255.009,00)	99,34	
3.31.2.07.3.302.2.01.055.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	191.200.000,00	189.944.991,00	(1.255.009,00)	99,34	
3.31.2.07.3.302.2.01.055.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	191.200.000,00	189.944.991,00	(1.255.009,00)	99,34	
3.31.2.07.3.302.2.01.055.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.300.000,00	195.557.480,00	(742.520,00)	99,62	
3.31.2.07.3.302.2.01.055.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	196.300.000,00	195.557.480,00	(742.520,00)	99,62	
3.31.2.07.3.302.2.01.055.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	196.300.000,00	195.557.480,00	(742.520,00)	99,62	
3.32.2.07.3.303.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	227.339.600,00	227.339.600,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.32.2.07.3.303.2.01.01	KOORDINASI DAN SINKRONISASI KERJASAMA PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	227.339.600,00	227.339.600,00	-	100,00	
3.32.2.07.3.303.2.01.015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	227.339.600,00	227.339.600,00	-	100,00	
3.32.2.07.3.303.2.01.015.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	227.339.600,00	227.339.600,00	-	100,00	
3.32.2.07.3.303.2.01.015.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	227.339.600,00	227.339.600,00	-	100,00	
3.32.2.07.3.304.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	132.751.000,00	132.735.750,00	(15.250,00)	99,98	
3.32.2.07.3.304.2.01.02	PENGUATAN INFRASTRUKTUR SOSIAL, EKONOMI DAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN SATUAN PEMUKIMAN	132.751.000,00	132.735.750,00	(15.250,00)	99,98	
3.32.2.07.3.304.2.01.025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	132.751.000,00	132.735.750,00	(15.250,00)	99,98	
3.32.2.07.3.304.2.01.025.1.02.01.	Belanja Barang	26.611.000,00	26.595.750,00	(15.250,00)	99,94	
3.32.2.07.3.304.2.01.025.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	26.611.000,00	26.595.750,00	(15.250,00)	99,94	
3.32.2.07.3.304.2.01.025.1.02.02.	Belanja Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00	
3.32.2.07.3.304.2.01.025.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00	
3.32.2.07.3.304.2.01.025.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	103.690.000,00	103.690.000,00	-	100,00	
3.32.2.07.3.304.2.01.025.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103.690.000,00	103.690.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	7.077.908.586,00	6.737.459.706,00	(340.448.880,00)	95,18	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(7.077.908.586,00)	(6.737.459.706,00)	340.448.880,00	95,18	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	-	-	-	



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO.	URAIAN	Ref	PER 31 DES 2023	PER 31 DES 2022
1				
2	EKUITAS AWAL	7.3.6.1	8,399,281,797.26	9,414,669,009.41
3	SURPLUS/ DEFISIT LO	7.3.6.2	(7,585,674,221.56)	(7,929,577,260.66)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/	7.3.6.3	-	
5	KESALAHAN MENDASAR :	7.3.6.3.1	-	
6	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7.3.6.3.2	-	
7	Koreksi Kas Daerah	7.3.6.3.3	-	
8	Koreksi Kas di Bendahara	7.3.6.3.4	-	
9	Koreksi Kas Lainnya	7.3.6.3.5	-	
10	Koreksi Piutang	7.3.6.3.6	-	
11	Koreksi Penyisihan Piutang	7.3.6.3.7	-	
12	Koreksi Nilai Persediaan	7.3.6.3.8	-	
13	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	7.3.6.3.9	-	
14	Koreksi Investasi Jangka Panjang	7.3.6.3.10	-	
15	Koreksi Aset Tetap	7.3.6.3.11	-	31,070,000.00
16	Koreksi Penyusutan	7.3.6.3.12	-	(31,070,000.00)
17	Koreksi Aset lainnya	7.3.6.3.13	-	
18	Koreksi Penyusutan Aset lainnya			
19	Koreksi Penyisihan Ganti Rugi	7.3.6.3.14	-	
20	Koreksi Amortisasi	7.3.6.3.15	-	
21	Koreksi Kewajiban jangka Pendek	7.3.6.3.16	-	
22	Koreksi Kewajiban jangka Panjang	7.3.6.3.17	-	
23	RK-PPKD		6,737,459,706.00	2,428,941,232
	EKUITAS AKHIR	7.7.4	7,551,067,281.70	3,914,032,980.76



KABUPATEN KAPUAS HULU
N E R A C A
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
Per 31 Desember Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	Reff	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	ASET	7:04:01		
2	ASET LANCAR	7.4.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	7.4.1.1.1	0.00	0.00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.4.1.1.2	-	0.00
5	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan	7.4.1.1.3	-	0.00
7	Kas Lainnya-Kas Di BLUD	7.4.1.1.4	0.00	0.00
8	Kas Lainnya-Sisa Dana BOS	7.4.1.1.5	0.00	0.00
9	Kas Lainnya-FKTP	7.4.1.1.6	0.00	0.00
10	Kas Lainnya-Sisa Dana BOSDA	7.4.1.1.7	0.00	0.00
11	Kas Lainnya - Jasa Giro	7.4.1.1.8	0.00	0.00
	Kas Lainnya - Saldo PFK		0.00	
12	Piutang Pajak	7.4.1.1.9	0.00	0.00
15	Piutang Retribusi	7.4.1.1.10	0.00	0.00
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.4.1.1.11	0.00	0.00
17	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah-Piutang BLUD	7.4.1.1.12	0.00	0.00
18	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah-Piutang Lainnya	7.4.1.1.13	0.00	0.00
19	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	7.4.1.1.14	-	0.00
20	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	7.4.1.1.15	0.00	0.00
21	Penyisihan Piutang	7.4.1.1.16	-	-
22	Beban Dibayar Dimuka	-	-	-
23	Persediaan	7.4.1.1.17	0.00	0.00
24	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 23)		0.00	0.00
26	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.4.1.2		
27	Investasi Nonpermanen	7.4.1.2.1		
28	Dana Bergulir		0.00	0.00
29	Penyisihan Dana Bergulir		-	-
30	Jumlah Investasi Nonpermanen (27 s/d 29)		0.00	0.00
32	Investasi Permanen	7.4.1.2.1		
33	Penyertaan Modal pada PT. Bank KALBAR			0.00
34	Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Kapuas Hulu			0.00
35	Penyertaan Modal pada Perumda Uncak Kapuas			0.00
36	Penyertaan Modal pada PT. JAMKRIDA			0.00
37	Penyertaan Modal pada BUMD PT. Uncak Kapuas Mandiri			0.00
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
40	Investasi Permanen Lainnya		-	-
41	Jumlah Investasi Permanen (33 s/d40)		0.00	0.00
42	Jumlah Investasi Jangka Panjang (30 + 41)		0.00	0.00
No	Uraian	Reff	2023 (Rp)	2022 (Rp)
44	ASET TETAP	7.4.1.3		
45	Tanah	7.4.1.3.1	89,255,500.00	89,255,500.00
46	Peralatan dan Mesin	7.4.1.3.2	3,071,521,065.24	3,071,521,065.24
47	Gedung dan Bangunan	7.4.1.3.3	5,594,971,141.25	5,389,893,661.25
48	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.4.1.3.4	9,282,345,842.07	9,282,345,842.07
49	Aset Tetap Lainnya	7.4.1.3.5	2,000,000.00	2,000,000.00
50	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.4.1.3.6	353,010,262.38	353,010,262.38
51	Akumulasi Penyusutan	7.4.1.3.7	(10,764,645,729.24)	(9,709,799,583.68)
52	Jumlah Aset Tetap (45 s/d 51)		7,628,458,081.70	8,478,226,747.26

54	DANA CADANGAN		-	-
55	Dana Cadangan		-	-
56	Jumlah Dana Cadangan (55)		-	-
58	ASET LAINNYA	7.4.1.5		
59	Tagihan Penjualan Angsuran	7.4.1.5.1	-	-
60	Tuntutan Perbendaharaan		-	-
61	Tuntutan Ganti Rugi	7.4.1.5.2	0.00	0.00
62	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	7.4.1.5.3	-	-
63	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.4.1.5.4	-	-
64	Aset Tak Berwujud	7.4.1.5.5	0.00	0.00
65	Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.4.1.5.6	-	-
66	Aset Lain-lain	7.4.1.5.7	172,853,103.46	172,853,103.46
67	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	7.4.1.5.8	(172,853,103.46)	(172,853,103.46)
	Kas yang dibatasi Penggunaannya	7.4.1.5.9		
68	Jumlah Aset Lainnya (59 s/d 67)		0.00	0.00
69	JUMLAH ASET (24 + 42 + 52 + 56 + 68)		7,628,458,081.70	8,478,226,747.26
71	KEWAJIBAN	7:04:02		
72	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.4.2.1		
73	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	-
74	Utang Bunga		-	-
75	Utang Jasa Medis		-	-
76	Utang Belanja	7.4.2.1.3	77,390,800.00	78,944,950.00
77	Utang Jangka Pendek- Utang Kelebihan Transfer		-	-
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.4.2.1.3	-	-
80	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (73 s/d 78)		77,390,800.00	78,944,950.00
81	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.4.2.2		
82	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
83	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
84	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
85	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank		-	-
86	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
87	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
88	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (82 s/d 87)		-	-
89	JUMLAH KEWAJIBAN (80 + 88)		77,390,800.00	78,944,950.00
90	EKUITAS DANA			
91	JUMLAH EKUITAS DANA	7:04:03	7,551,067,281.70	8,399,281,797.26
92	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7:04:04	7,628,458,081.70	8,478,226,747.26



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
LAPORAN OPERASIONAL
 PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Reff	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1	0.00	
Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.2	0.00	0.00
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.5.1.1.3	0.00	
Lain-Lain PAD yang Sah	7.5.1.1.4	0.00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		0.00	0.00
PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.2		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil Pajak		0.00	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		0.00	
Dana Alokasi Umum		0.00	
Dana Alokasi Khusus		0.00	
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		0.00	0.00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			
Dana Otonomi Khusus			
Dana Insentif Desa (DID)		-	0
Dana Desa		-	0
Dana Penyesuaian		0.00	
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		0.00	0.00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		0.00	
Pendapatan Dana BOS		0	0
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		0.00	0.00
BANTUAN KEUANGAN			
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi			
Jumlah Bantuan Keuangan		-	-
Jumlah Pendapatan Transfer		0.00	0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.3		
Pendapatan Hibah BOS		-	
Pendapatan Hibah Provinsi		-	
Lain-Lain Pendapatan		0.00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN		0.00	0.00
BEBAN OPERASI	7.5.2.1		
Beban Pegawai	7.5.2.1.1	3,449,634,861.00	1,845,299,323.00
Beban Persediaan	7.5.2.1.2	489,238,550.00	176,376,000.00
Beban Jasa	7.5.2.1.3	634,579,824.00	124,545,509.00
Beban Pemeliharaan	7.5.2.1.4	120,310,000.00	25,000,000.00
Beban Perjalanan Dinas	7.5.2.1.5	1,321,275,600.00	180,043,000.00
Beban Barang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.5.2.1.6		
Beban Uang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.5.2.1.7	-	65,000,000.00
Beban Subsidi	7.5.2.1.8	-	
Beban Penyisihan Piutang	7.5.2.1.9	-	
Beban Penyusutan	7.5.2.1.10	1,054,846,145.56	147,251,536.42
Beban Amortisasi	7.5.2.1.11	-	
Beban Hibah	7.5.2.1.12	515,789,241.00	
Beban Bansos	7.5.2.1.13	-	
Beban Beasiswa	7.5.2.1.14	-	

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	7.5.2.1.15	-	10,000,000.00
Beban Ekstrakomptabel	7.5.2.1.16	-	9,600,000.00
Beban Lain-lain	7.5.2.1.17	-	
Jumlah Beban Operasi		7,585,674,221.56	2,583,115,368.42
			0
BEBAN TRANSFER	7.5.2.2		
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak			
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi			
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya			
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa			
Beban Transfer Keuangan Lainnya			
Jumlah Beban Transfer		0.00	0.00
JUMLAH BEBAN DAN TRANSFER		7,585,674,221.56	2,583,115,368.42
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	7.5.03	-7,585,674,221.56	-2,583,115,368.42
SURPLUS NON OPERASIONAL	7.5.4.1	0.00	0.00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Surplus Non Operasional		0.00	0.00
DEFISIT NON OPERASIONAL	7.5.4.2		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Defisit Non Operasional		0.00	0.00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-7,585,674,221.56	-2,583,115,368.42
PENDAPATAN LUAR BIASA	7:05:05		
Pendapatan Luar Biasa		0	
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0	0
BEBAN LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa			
Jumlah Beban Luar Biasa		0.00	0.00
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	7:05:06	-7,585,674,221.56	-2,583,115,368.42

KABUPATEN KAPUAS HULU
IKHTISAR ASET TETAP DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Jenis Aset	Saldo per 31 Des 2022	Mutasi 2023								Saldo per 31 Des 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	Nilai Buku per 31 des 2023	
			Aset Masuk dari SKPD Lain	Aset Keluar ke SKPD Lain	Aset Masuk dari Belanj a Modal	Atribusi Belanj a Penunj ang	Reklas Masuk	Reklas Keluar	Ekstrakontable TAHUN 2023	Sebab Peraturan					koreksi / Penghapusan
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11=(3+4+5+6+7+8+9+10)	12	13	14
1	TANAH	89,255,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,255,500.00	-	-	89,255,500.00
	Tanah	89,255,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,255,500.00	-	-	89,255,500.00
2	PERALATAN DAN MESIN	3,071,521,065.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,071,521,065.24	2,931,207,570.38	94,724,238.77	140,313,494.86
	Alat Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Angkutan	1,764,342,413.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,764,342,413.84	1,734,359,526.97	5,996,577.37	29,982,886.87
	Alat Bantu/ Pengolah Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Bengkel dan Ukur	91,047,284.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,047,284.76	89,020,970.86	1,013,156.95	2,026,313.91
	Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	515,828,069.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515,828,069.27	502,350,182.61	18,531,205.27	13,477,886.66
	Alat Komputer	613,502,433.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613,502,433.37	520,726,415.13	64,738,126.37	92,776,018.24
	Alat Studio dan Komunikasi	86,800,864.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,800,864.00	84,750,474.82	4,445,172.80	2,050,389.18
	Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Rambu- rambu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Praktek/Peraga/ Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Keamanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	5,389,893,661.25	-	-	195,557,480.00	9,520,000.00	-	-	-	-	-	5,594,971,141.25	1,468,665,505.57	136,552,267.61	4,126,305,635.68
	Bangunan Gedung	4,613,472,669.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,613,472,669.64	1,245,536,451.82	113,974,740.77	3,367,936,217.82
	Monumen dan Tugu	776,420,991.61	-	-	195,557,480.00	9,520,000.00	-	-	-	-	-	981,498,471.61	223,129,053.75	22,577,526.84	758,369,417.86
4	JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	9,282,345,842.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,282,345,842.07	6,364,772,653.29	823,569,639.18	2,917,573,188.78
	Jalan dan Jembatan	9,198,826,009.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,198,826,009.68	6,346,579,768.43	821,648,258.37	2,852,246,241.25
	Bangunan Air (irigasi) dan jaringan air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Instalasi	83,519,832.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,519,832.39	18,192,884.86	1,921,380.81	65,326,947.53
	Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ASET TETAP LAINNYA	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
	Buku dan Perpustakaan	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alat-alat Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset -aset Renovasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KOSTRUKSI DALAM PENERJAAN	353,010,262.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,010,262.38	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	353,010,262.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,010,262.38	-	-	-
7	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18,188,026,330.94	-	-	195,557,480.00	9,520,000.00	-	-	-	-	-	18,393,103,810.94	10,764,645,729.24	1,054,846,145.56	7,275,447,819.32



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

Jalan Adi Sucipto No. 2. A Putussibau Kode Pos 78715 Telepon/Fax (0567) 21205
WA : 081280366798 Website: disnakertranskapuashulu.go.id
Email: disnakertranskabkh@gmail.com

BERITA ACARA STOK PERSEDIAAN BAHAN PAKAI HABIS

PER 29 DESEMBER 2023

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN : KAPUAS HULU
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan pengecekan barang pakai habis dan Tidak terdapat sisa persediaan barang di gudang.

Demikian Berita Acara ini di buat , dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Kapuas Hulu

Pengurus Barang

Elisabet Roslin, S.H.,M.Si.
NIP. 19671105 199003 2 010

Ally, S.A.P.
NIP. 19690809 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Danau Luar No. 02 Putussibau 78711 Telp/Fax. (0567) 21682

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 900.1.6.3/ / BKAD / ASD

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Bertempat di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Yang Bertanda tangan dibawah ini,

- 1 Nama : ALLY, S.A.P
Jabatan : Pengurus Barang
NIP : 196908090199003 1 004
- 2 Nama : ARISTA NDRI/ASTUTI, S.E
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
NIP : 19880211 201001 2 004

Menyatakan bahwaTelah melakukan Rekonsiliasi Aset tetap Barang Milik Daerah dengan hasil sebagai berikut :

No. Urut	Nama Bidang Barang	Saldo Tahun 2022	LRA 2023	MUTASI 2023		Saldo Akhir 2023
				Tambah	Kurang	
1	Tanah	Rp 89,255,500.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 89,255,500.00
1.3.1.01.	Tanah	Rp 89,255,500.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 89,255,500.00
2	Peralatan dan Mesin	Rp 3,071,521,065.24	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3,071,521,065.24
1.3.2.01	Alat-alat Besar	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.02	Alat Angkutan	Rp 1,764,342,413.84	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,764,342,413.84
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 91,047,284.76	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 91,047,284.76
1.3.2.04	Alat Pertanian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.05	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	Rp 515,828,069.27	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 515,828,069.27
1.3.2.06	Alat Studio dan Komunikasi	Rp 86,800,864.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 86,800,864.00
1.3.2.07	Alat Kedokteran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.08	Alat Laboratorium	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.09	Alat Persenjataan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.10	Komputer	Rp 613,502,433.37	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 613,502,433.37
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.12	Alat Pengeboran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.16	Alat Praga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.18	Rambu - Rambu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.19	Peralatan Olah raga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	Gedung dan Bangunan	Rp 5,389,893,661.25	Rp 175,993,730.00	Rp 29,083,750.00	Rp -	Rp 5,594,971,141.25
1.3.3.01	Bangunan Gedung	Rp 4,613,472,669.64	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4,613,472,669.64
1.3.3.02	Monumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.3.03	Bangunan Menara	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol /Pasti	Rp 776,420,991.61	Rp 175,993,730.00	Rp 29,083,750.00	Rp -	Rp 981,498,471.61
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 9,282,345,842.07	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9,282,345,842.07
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	Rp 9,198,826,009.68	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9,198,826,009.68
1.3.4.02	Bangunan Air	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.4.03	Instalasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.4.04	Jaringan	Rp 83,519,832.39	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 83,519,832.39
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 2,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,000,000.00
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	Rp 2,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,000,000.00
1.3.5.02	Barang Bercorak Kebudayaan Kesenian /Kebudayaan dan Olahraga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.5.03	Hewan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.5.04	Biota Perairan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.5.05	Tanaman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.5.07	Aset tetap Dalam Renovasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

6		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 353,010,262.38	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 353,010,262.38
	1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 353,010,262.38	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 353,010,262.38
7		Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.3.5.08.	Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH TOTAL ASET TETAP			Rp 18,188,026,330.94	Rp 175,993,730.00	Rp 29,083,750.00	Rp -	Rp 18,393,103,810.94
8		Aset Lain-lain	Rp 172,853,103.46	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 172,853,103.46
9		Nilai Dibawah Minimum	Rp 208,429,568.48	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 208,429,568.48

I. Hasil Rekonsiliasi Rincian data BMD Mutasi Terlampir

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMD terkait penyusunan laporan Aset dalam berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara inidibuat untuk bahan penyusunan Laporang Barang Milik Daerah Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan Akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Putussibau,31 Desember 2023

Pengurus Barang

Bendahara Pengeluaran

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

ARISTA INDRI ASTUTI, S.E

NIP. 19880211 201001 2 004

ALLY, S.A.P

NIP. 196908090199003 1 004

Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Aset Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Bidang Akuntansi
Badan Keuangan dan Aset Daerah

M. FAHRORRAZZI, S.S.Pi

NIP.19820924 201101 1 002

NAZARIUS HARDI, SE.

NIP.19720418 199303 1 004

Mengetahui,

Kepala Bidang Aset Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kepala Bidang Akuntansi
Badan Keuangan dan Aset Daerah

JEKI, SE.,M.Ec.Dev.

NIP.19750807 200301 1 001

AGUSNINAWATI, SE,AK.MM

NIP.19740812 200401 2 001

**REKONSILIASI DATA ASET TETAP
TAHUN 2023**

OPD : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

NO	Nama Bidang Barang	SO 2022	PENAMBAHAN						Total Penambahan	PENGURANGAN					Total Pengurangan	SO 2023	KIB	Selisih
			LRA Belanja Modal	Penunjang	Kapitalisasi/Bekasifikasi	Rampasan/Sitaan	Sebab lain karena Peraturan	Penghapusan		Hibah ke Pihak Lain	Mutasi	Kapitalisasi(di bawah Nilai Satuan Minimum)	Sebab lain karena Peraturan					
1	Tanah	Rp 89.255.500.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 89.255.500.00	Rp 89.255.500.00	Rp -
	Tanah	Rp 89.255.500.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 89.255.500.00	Rp 89.255.500.00	Rp -
2	Peralatan dan Mesin	Rp 3.071.521.065.24	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.071.521.065.24	Rp 3.071.521.065.24	Rp -
	Alat-alat Besar	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Alat Angkutan	Rp 1.764.342.413.84	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.764.342.413.84	Rp 1.764.342.413.84	Rp -
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 91.047.284.76	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 91.047.284.76	Rp 91.047.284.76	Rp -
	Alat Pertanian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	Rp 515.828.069.27	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 515.828.069.27	Rp 515.828.069.27	Rp -
	Alat Studio dan Komunikasi	Rp 86.800.864.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 86.800.864.00	Rp 86.800.864.00	Rp -
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Alat Laboratorium	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Alat Peralengkapan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Komputer	Rp 613.502.433.37	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 613.502.433.37	Rp 613.502.433.37	Rp -
	Alat Eksplorasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Alat Penggeboran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Alat Produksi/Pengolahan dan Pemurnian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Alat Bantu Eksplorasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Alat Keselamatan Kerja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Alat Peraga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Peralatan Proses/Produksi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rambu-Rambu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Peralatan Olahraga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	Gedung dan Bangunan	Rp 5.389.893.661.25	Rp 175.993.730.00	Rp 29.083.750.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 205.077.480.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.594.971.411.25	Rp 5.594.971.411.25	Rp -
	Bangunan Gedung	Rp 4.613.472.669.64	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.613.472.669.64	Rp 4.613.472.669.64	Rp -
	Monumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Bangunan Menara	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Tugu Tiki Kontrol/Pasti	Rp 776.420.991.61	Rp 175.993.730.00	Rp 29.083.750.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 205.077.480.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 981.498.471.61	Rp 981.498.471.61	Rp -
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 9.282.345.842.07	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9.282.345.842.07	Rp 9.282.345.842.07	Rp -
	Jalan dan Jembatan	Rp 9.198.826.009.68	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9.198.826.009.68	Rp 9.198.826.009.68	Rp -
	Bangunan Air	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Instalasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Jaringan	Rp 83.519.832.39	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 83.519.832.39	Rp 83.519.832.39	Rp -

NO	Nama Bidang Barang	SO 2022	PENAMBAHAN						Total Penambahan	PENGURANGAN					Total Pengurangan	SO 2023	KIB	Selisih
			LRA Belanja Modal	Penunjang	Kapitalisasi/Reklasifikasi	Rampasan/Sitaan	Sebab Lain karena Peraturan	Penghapusan		Hibah ke Pihak Lain	Mutasi	Kapitalisasi(di bawah Nilai Satuan Minimum)	Sebab Lain karena Peraturan					
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 2.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp -
	Buku Perpustakaan	Rp 2.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp -
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Dahraga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Hewan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Biota Pesisiran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Tanaman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Barang Koleksi Non Budaya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 353.010.262,38	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 353.010.262,38	Rp 353.010.262,38	Rp -
	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 353.010.262,38	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 353.010.262,38	Rp 353.010.262,38	Rp -
7	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH ASET TETAP	Rp 18.188.026.330,94	Rp 175.993.730,00	Rp 29.083.750,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 205.077.480,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 18.393.103.810,94	Rp 18.393.103.810,94	Rp -
8	Aset Lain-lain	Rp 172.853.103,46	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 172.853.103,46	Rp 172.853.103,46	Rp -
9	Ekstra Komptabel	Rp 208.429.568,48	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 208.429.568,48	Rp 208.429.568,48	Rp -
	JUMLAH ASET LAINNYA	Rp 381.282.671,94	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 381.282.671,94	Rp 381.282.671,94	Rp -

Bendahara Pengeluaran

ARISTA INDRI ASTUTI,S.E
NIP. 19880211 201001 2 004

Putussibau,31 Desember 2023
Pengurus Barang
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

ALLY,S.A.P
NIP. 196908090199003 1 004

**RINCIAN BELANJA MODAL
TAHUN 2023**

OPD : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

No.	Nama Jenis Barang	Kode Barang	Merek/Type	Bahan	Tahun Perolehan	Satuan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Total Belanja Modal	% harga Perolehan	Total Biaya atribusi	Harga dalam Daftar aset/KIB	Keterangan
A	Belanja Modal:													
I	Pagar		beton		2023	M	I	175,993,730.00	175,993,730	195,557,480.00	0.90	8,567,610.452	184,561,340.452	
	Perencanaan							11,877,000	11,877,000	195,557,480.00	0.06	578,188.265	12,455,188.265	
	Pengawasan							7,686,750	7,686,750	195,557,480.00	0.04	374,201.283	8,060,951.283	
									195,557,480		1.00	9,520,000.00	205,077,480.00	

Bendahara Pengeluaran

ARISTA INDRI ASTUTI. S.E
NIP. 19880211 201001 2 004

Putussibau, 31 Desember 2023
Pengurus Barang
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

ALLY. S.A.P
NIP. 196908090199003 1 004

**RINCIAN MUTASI/PINDAH PENCATATAN
TAHUN 2023**

OPD : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

NAMA SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	NOMOR REGISTER	MEREK/TIPE	UKURAN	BAHAN	KONDISI	SATUAN	TAHUN PEROLEHAN	NOMOR				ASAL	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN	MUTASI KE	
										RANGKA	MESIN	POLISI	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	
A. MUTASI MASUK																		
Jumlah															Rp	-		
B. MUTASI KELUAR																		
Jumlah															Rp	-		

Bendahara Pengeluaran

ARISTA INDRI ASTUTI S.E
NIP. 19880211 201001 2 004

Putussibau, 31 Desember 2023
Pengurus Barang
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

ALLY, S.A.P
NIP. 196908090199003 1 004

PENGHAPUSAN TAHUN ANGGARAN 2023

OPD : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

[illegible]

Bendahara Pengeluaran

ARISTA INDRI ASTUTI, S.E
NIP. 19880211 201001 2 004

Putussibau, 31 Desember 2023
Pengurus Barang
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

ALLY, S.A.P
NIP. 196908090199003 1 004

OPD : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

BUKU INVENTARIS

SKPD : 2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 PROVINSI : Kalimantan Barat

NO. KODE LOKASI : 12.26.06.1.02.01.04

Nomor			Spesifikasi Barang			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B, KB, RB)	Jumlah		Keterangan
No. Urut	Kode Barang	Register	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.		ASET									27	172.853.103,46	
2	1.3.		ASET TETAP									27	172.853.103,46	
3	1.3.2.		PERALATAN DAN MESIN									27	172.853.103,46	
4	1.3.2.04.		ALAT PERTANIAN									1	8.000.000,00	
5	1.3.2.04.01.		ALAT PENGOLAHAN									1	8.000.000,00	
6	1.3.2.04.01.02.		ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK									1	8.000.000,00	
7	1.3.2.04.01.02.013.	00001	Peralatan Pertanian dan Peternakan	-	---	-	APBD	2008		Paket	Rusak Berat	1	8.000.000,00	Alat Pertanian
8	1.3.2.05.		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA									4	21.617.500,00	
9	1.3.2.05.02.		ALAT RUMAH TANGGA									4	21.617.500,00	
10	1.3.2.05.02.01.		MEUBELAIR									1	6.200.000,00	
11	1.3.2.05.02.01.057.	00001	Meja Kerja 1 Biro	-	---	Kayu	APBD	2013		Unit	Rusak Berat	1	6.200.000,00	-
12	1.3.2.05.02.03.		ALAT PEMBERSIH									1	2.970.000,00	
13	1.3.2.05.02.03.003.	00001	Mesin Pemotong Rumput	Tanaka	---	Besi Metal	APBD	2012		Unit	Rusak Berat	1	2.970.000,00	-
14	1.3.2.05.02.06.		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)									2	12.447.500,00	
15	1.3.2.05.02.06.080.	00001	Vacum Cleaner (Penyedot Debu)	Electrolux	-	Campuran	APBD	2011		Unit	Rusak Berat	1	10.000.000,00	
16	1.3.2.05.02.06.122.	00001	Hand Scanner,Label dan Ribbon Barcode	Canon	---	Elektronik	APBD	2013		Unit	Rusak Berat	1	2.447.500,00	Scanner (Peralatan P
17	1.3.2.06.		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR									3	9.399.000,00	
18	1.3.2.06.01.		ALAT STUDIO									2	3.399.000,00	
19	1.3.2.06.01.01.		PERALATAN STUDIO AUDIO									2	3.399.000,00	
20	1.3.2.06.01.01.096.	00001-00002	Speaker	BMB	-	Elektonik	APBD	2012		Unit	Rusak Berat	2	3.399.000,00	
21	1.3.2.06.02.		ALAT KOMUNIKASI									1	6.000.000,00	
22	1.3.2.06.02.06.		ALAT KOMUNIKASI SOSIAL									1	6.000.000,00	
23	1.3.2.06.02.06.007.	00001	Infocus (Alat Studio Komunikasi)	AcerX183GDLF	---	Elektronik	APBD	2016		Unit	Rusak Berat	1	6.000.000,00	LCD Projector/Infocus
24	1.3.2.10.		KOMPUTER									19	133.836.603,46	
25	1.3.2.10.01.		KOMPUTER UNIT	36								12	111.352.502,38	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15
26	1.3.2.10.01.02.		PERSONAL KOMPUTER									12	111.352.502,38	
27	1.3.2.10.01.02.001.	00001	P.C Unit	LENOVO	---	Elektronik	APBD	2013		Unit	Rusak Berat	1	9.114.669,38	-
28	1.3.2.10.01.02.001.	00001	P.C Unit	Acer	---	Elektronik	APBD	2015		Unit	Rusak Berat	1	9.000.000,00	-
29	1.3.2.10.01.02.001.	00003	P.C Unit	Acer	---	Elektronik	APBD	2015		SET	Rusak Berat	1	9.000.000,00	-
30	1.3.2.10.01.02.001.	00001	P.C Unit	Acer	---	Elektronik	APBD	2016		Unit	Rusak Berat	1	8.750.000,00	-
31	1.3.2.10.01.02.003.	00004	Note Book	Acer	---	Elektronik	APBD	2010		Unit	Rusak Berat	1	15.000.000,00	-
32	1.3.2.10.01.02.003.	00001	Note Book	Asus	---	Elektronik	APBD	2011		Unit	Rusak Berat	1	11.850.000,00	-
33	1.3.2.10.01.02.003.	00001-00007	Note Book	Acer	---	Elektronik	APBD	2012		Unit	Rusak Berat	4	34.000.000,00	-
34	1.3.2.10.01.02.003.	00004	Note Book	Acer	---	Elektronik	APBD	2012		Unit	Rusak Berat	1	8.304.500,00	
35	1.3.2.10.01.02.003.	00001	Note Book	Acer	---	Elektronik	APBD	2014		Unit	Rusak Berat	1	6.333.333,00	-
36	1.3.2.10.02.		PERALATAN KOMPUTER									7	22.484.101,08	
37	1.3.2.10.02.01.		PERALATAN MAINFRAME									2	3.999.600,00	
38	1.3.2.10.02.01.018.	00001-00002	UPS (Peralatan Kantor)	ICA	---	Elektronik	APBD	2012		Unit	Rusak Berat	2	3.999.600,00	VDR
39	1.3.2.10.02.03.		PERALATAN PERSONAL KOMPUTER									5	18.484.501,08	
40	1.3.2.10.02.03.003.	00001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson LQ 2180	---	Elektronik	APBD	2008		Unit	Rusak Berat	1	7.000.000,00	
41	1.3.2.10.02.03.003.	00001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	NON PIXMA 16	---	Elektronik	APBD	2012		Unit	Rusak Berat	1	1.020.000,00	-
42	1.3.2.10.02.03.003.	00001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	NON PIXMA 27	---	Elektronik	APBD	2013		Unit	Rusak Berat	1	2.814.501,08	-
43	1.3.2.10.02.03.003.	00003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	LASER JET	---	Elektronik	APBD	2014		Buah	Rusak Berat	1	3.250.000,00	
44	1.3.2.10.02.03.003.	00004	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L220	---	-	APBD	2014		Buah	Rusak Berat	1	4.400.000,00	
TOTAL												728	172,853,103.46	

Mengetahui
Kepala SKPD

Pengurus Barang

ELISABET ROSLIN, SH., M.Si.
NIP. 19671105 199003 2 010

ALLY, S.A.P.
NIP. 19690809 199003 1 004

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

SKPD : 2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PROVINSI : Kalimantan Barat

NO. KODE LOKASI : 12.26.06.1.02.01.04

Halaman 1 dari 1 Halaman

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal-usul	Harga (Rp)	Keterangan	Nama SKPD
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat						
								Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	0	NIHIL	NIHIL	NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	0,00	NIHIL	
TOTAL												0,00		

Putussibau,

Pengurus Barang

ELISABET ROSLIN, SH., M.Si.
NIP. 19671105 199003 2 010

ALLY, S.A.P.
NIP. 19690809 199003 1 004

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN
Tahun 1900 s/d Tahun 2023

SKPD
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: 2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
: PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
: Kalimantan Barat

NO. KODE LOKASI : 12.26.06.1.02.01.04

Halaman 1 dari 6 Halaman

Nama SKPD	No Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran /cc	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal-usul Cara Perolehan	Kondisi	Harga	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	1	1.3.2.04.	ALAT PERTANIAN													8.000.000	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	2	1.3.2.04.01.	ALAT PENGOLAHAN													8.000.000	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	3	1.3.2.04.01.02.	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TEF													8.000.000	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	4	1.3.2.04.01.02.013.	Peralatan Pertanian dan Peternakan	00001	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	APBD	Rusak Berat	8.000.000	Alat Pertanian
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	5	1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA													21.617.500	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	6	1.3.2.05.02.	ALAT RUMAH TANGGA													21.617.500	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	7	1.3.2.05.02.01.	MEUBELAIR													6.200.000	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	8	1.3.2.05.02.01.057.	Meja Kerja 1 Biro	00001	-	1/2 Biro	Kayu	2013	-	-	-	-	-	APBD	Rusak Berat	6.200.000	-
									39								

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	9	1.3.2.05.02.03.	ALAT PEMBERSIH													2.970.000	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	10	1.3.2.05.02.03.003.	Mesin Pemotong Rumput	00001	Tanaka	2 Tak	Besi Metal	2012	-	-	-	-	-	APBD	Rusak Berat	2.970.000	-
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	11	1.3.2.05.02.06.	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME U													12.447.500	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	12	1.3.2.05.02.06.080.	Vacum Cleaner (Penyedot Debu)	00001	Electrolux		Campuran	2011						APBD	Rusak Berat	10.000.000	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	13	1.3.2.05.02.06.122.	Hand Scanner,Label dan Ribbon Barcode	00001	Canon	-	Elektronik	2013	-	-	-	-	-	APBD	Rusak Berat	2.447.500	Scanner (Peralatan Personal Komputer)
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	14	1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANC													9.399.000	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	15	1.3.2.06.01.	ALAT STUDIO													3.399.000	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	16	1.3.2.06.01.01.	PERALATAN STUDIO AUDIO													3.399.000	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	17	1.3.2.06.01.01.096.	Speaker	00001	BMB		Elektronik	2012						APBD	Rusak Berat	1.699.500	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	18	1.3.2.06.01.01.096.	Speaker	00002	BMB		Elektronik	2012						APBD	Rusak Berat	1.699.500	
									40								

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	19	1.3.2.06.02.	ALAT KOMUNIKASI													6.000.000	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	20	1.3.2.06.02.0 6.	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL													6.000.000	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	21	1.3.2.06.02.0 6.007.	Infocus (Alat Studio Komunikasi)	00001	AcerX183GDLP	-	Elektronik	2016	-	-	-	-	-	APBD	Rusak Berat	6.000.000	LCD Projector/Infocus
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	22	1.3.2.10.	KOMPUTER													133.836.603	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	23	1.3.2.10.01.	KOMPUTER UNIT													111.352.502	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	24	1.3.2.10.01.0 2.	PERSONAL KOMPUTER													111.352.502	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	25	1.3.2.10.01.0 2.001.	P.C Unit	00001	LENOVO	14 Inch	Elektronik	2013	-	-	-	-	-	APBD	Rusak Berat	9.114.669	-
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	26	1.3.2.10.01.0 2.001.	P.C Unit	00001	Acer	14 Inch	Elektronik	2015	-	-	-	-	-	APBD	Rusak Berat	9.000.000	-
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	27	1.3.2.10.01.0 2.001.	P.C Unit	00003	Acer	14 Inch	Elektronik	2015	-	-	-	-	-	APBD	Rusak Berat	9.000.000	-
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	28	1.3.2.10.01.0 2.001.	P.C Unit	00001	Acer	14 Inch	Elektronik	2016	-	-	-	-	-	APBD	Rusak Berat	8.750.000	-
									41								

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	29	1.3.2.10.01.0 2.003.	Note Book	00004	Acer	14 Inch	Elektronik	2010	-	-	-	-	-	APBD	Rusak Berat	15.000.000	-
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	30	1.3.2.10.01.0 2.003.	Note Book	00001	Asus	14 Inch	Elektronik	2011	-	-	-	-	-	APBD	Rusak Berat	11.850.000	-
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	31	1.3.2.10.01.0 2.003.	Note Book	00001	Acer	14 Inch	Elektronik	2012	-	-	-	-	-	APBD	Rusak Berat	8.500.000	-
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	32	1.3.2.10.01.0 2.003.	Note Book	00002	Acer	14 Inch	Elektronik	2012	-	-	-	-	-	APBD	Rusak Berat	8.500.000	-
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	33	1.3.2.10.01.0 2.003.	Note Book	00003	Acer	14 Inch	Elektronik	2012	-	-	-	-	-	APBD	Rusak Berat	8.500.000	-
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	34	1.3.2.10.01.0 2.003.	Note Book	00004	Acer	14 Inch	Elektronik	2012	-	-				APBD	Rusak Berat	8.304.500	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	35	1.3.2.10.01.0 2.003.	Note Book	00007	Acer	14 Inch	Elektronik	2012	-	-	-	-	-	APBD	Rusak Berat	8.500.000	-
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	36	1.3.2.10.01.0 2.003.	Note Book	00001	Acer	14 inc	Elektonik	2014	-	-	-	-	-	APBD	Rusak Berat	6.333.333	-
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	37	1.3.2.10.02.	PERALATAN KOMPUTER													22.484.101	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	38	1.3.2.10.02.0 1.	PERALATAN MAINFRAME													3.999.600	
									42								

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TOTAL																172,853,103.46	

Mengetahui
Kepala SKPD

Putussibau, 12 Januari 2024

Pengurus Barang

ELISABET ROSLIN, SH., M.Si.
NIP. 19671105 199003 2 010

ALLY, S.A.P.
NIP. 19690809 199003 1 004

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN
Tahun 1900 s/d Tahun 2023

SKPD

: 2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN/KOTA

: PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PROVINSI

: Kalimantan Barat

NO. KODE LOKASI :

12.26.06.1.02.0

Halaman 1 dari 1 Halaman

Nama SKPD	No. Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Harga	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Keterangan
			Kode Barang	Register		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	0,00		NIHIL	NIHIL
TOTAL														0.00			

Mengetahui
Kepala SKPD

Pengurus Barang

ELISABET ROSLIN, SH., M.Si.
NIP. 19671105 199003 2 010

ALLY, S.A.P.
NIP. 19690809 199003 1 004

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
Tahun 1900 s/d Tahun 2023

SKPD : 2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI : Kalimantan Barat

NO. KODE LOKASI : 12.26.06.1.02.01.04

Halaman 1 dari 1 Halaman

Nama SKPD	No. Urut.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal-usul	Harga	Kondisi (B, KB, RB)	Ket
			Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	0	0	0	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		NIHIL	0,00	NIHIL	NIHIL
TOTAL															0,00		

Mengetahui
Kepala SKPD

Pengurus Barang

ELISABET ROSLIN, SH., M.Si.
NIP. 19671105 199003 2 010

ALLY, S.A.P.
NIP. 19690809 199003 1 004

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E
ASET TETAP LAINNYA
Tahun 1900 s/d Tahun 2023

SKPD : 2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI : Kalimantan Barat

NO. KODE LOKASI : 12.26.06.1.02.01.08

Halaman 1 dari 1 Halaman

Nama SKPD	No. Urut.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Buku/Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Tahun Cetak/ Pembelian	Asal-usul Cara Perolehan	Harga	Ket
			Kode Barang	Register	Judul/ Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRI AN DAN TRANSMIGRA SI	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1	NIHIL	NIHIL	0,00	NIHIL
TOTAL															0,00	

Mengetahui
Kepala SKPD

.....
Pengurus Barang

ELISABET ROSLIN, SH., M.Si.
NIP. 19671105 199003 2 010

ALLY, S.A.P.
NIP. 19690809 199003 1 004

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
Tahun 1900 s/d Tahun 2023

SKPD : 2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PROVINSI : Kalimantan Barat

NO. KODE LOKASI : 12.26.06.1.02.01.16

Halaman 1 dari 1 Halaman

Nama SKPD	No. Urut.	Jenis Barang/ Nama Barang	Bangunan (P,SP,D)	Kostruksi Bangunan		Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Tgl,Bln, Thn mulai	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak (ribuan Rp)	Ket
				Bertingkat/ Tidak	Beton/tidak			Tanggal	Nomor						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIA N DAN TRANSMIGRAS I	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		NIHIL	NIHIL	0,00	NIHIL
TOTAL														0,00	

Mengetahui
Kepala SKPD

Pengurus Barang

ELISABET ROSLIN, SH., M.Si.
NIP. 19671105 199003 2 010

ALLY, S.A.P.
NIP. 19690809 199003 1 004

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) G
ASET TIDAK BERWUJUD
s.d 31 DESEMBER 2023

SKPD : 2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN/KOTA : Kapuas Hulu
PROVINSI : Kalimantan Barat

NO. KODE LOKASI : 12.26.06.1.02.01.08

Halaman 1 dari 1 Halaman

Nama SKPD	No. Urut.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Pencipta	Spesifikasi	Jenis	Ukuran	Tahun Cetak/ Pembelian	Asal-usul Cara Perolehan	Harga	Ket
			Kode Barang	Register								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	0	NIHIL
TOTAL											0	

Mengetahui
Kepala SKPD

Kapuas Hulu, 12 Januari 2024
Pengurus Barang

ELISABET ROSLIN, SH., M.Si.
NIP. 19671105 199003 2 010

ALLY, S.A.P.
NIP. 19690809 199003 1 004

DAFTAR PENYUSUTAN BARANG
KABUPATEN KAPUAS HULU
BULAN : DESEMBER, TAHUN ANGGARAN : 2023

SKPD : 2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINI
KABUPATEN / KOTA : KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI : Kalimantan Barat

No. Urut	NOMOR		SPESIFIKASI BARANG		UMEKO	TAHUN	NILAI ASET	NILAI PENYUSUTAN	AKUMULUASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
	Kode Barang	Register	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	1.3.2.02.		Sub Total - ALAT ANGKUTAN				1.764.342.413,84	5.996.577,37	1.734.359.526,97	29.982.886,87
1	1.3.2.02.01.01.001.	00001	Sedan		7	2008	174.000.000,00	0,00	174.000.000,00	0,00
2	1.3.2.02.01.03.002.	00001	Pick Up		7	2014	277.750.000,00	0,00	277.750.000,00	0,00
3	1.3.2.02.01.03.002.	00001	Pick Up		7	2015	382.010.000,00	0,00	382.010.000,00	0,00
4	1.3.2.02.01.04.001.	000003	Sepeda Motor		7	2022	20.988.020,80	2.998.288,69	5.996.577,37	14.991.443,43
5	1.3.2.02.01.04.001.	000004	Sepeda Motor		7	2022	20.988.020,80	2.998.288,69	5.996.577,37	14.991.443,43
6	1.3.2.02.01.04.001.	000005	Sepeda Motor		7	2015	17.070.000,00	0,00	17.070.000,00	0,00
7	1.3.2.02.01.04.001.	000005	Sepeda Motor		7	2010	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
8	1.3.2.02.01.04.001.	00001	Sepeda Motor		7	2010	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00	0,00
9	1.3.2.02.01.04.001.	00001	Sepeda Motor		7	2011	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
10	1.3.2.02.01.04.001.	00001	Sepeda Motor		7	2012	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00
11	1.3.2.02.01.04.001.	00001	Sepeda Motor		7	2014	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
12	1.3.2.02.01.04.001.	00001	Sepeda Motor		7	2015	25.310.000,00	0,00	25.310.000,00	0,00
13	1.3.2.02.01.04.001.	00001	Sepeda Motor		7	2008	17.860.000,00	0,00	17.860.000,00	0,00
14	1.3.2.02.01.04.001.	00001	Sepeda Motor		7	2016	14.782.601,97	0,00	14.782.601,97	0,00
15	1.3.2.02.01.04.001.	00001	Sepeda Motor		7	2003	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
16	1.3.2.02.01.04.001.	00001	Sepeda Motor		7	2004	15.190.000,00	0,00	15.190.000,00	0,00
17	1.3.2.02.01.04.001.	00002	Sepeda Motor		7	2004	9.920.000,00	0,00	9.920.000,00	0,00
18	1.3.2.02.01.04.001.	00002	Sepeda Motor		7	2016	14.782.601,97	0,00	14.782.601,97	0,00
19	1.3.2.02.01.04.001.	00002	Sepeda Motor		7	2015	25.310.000,00	0,00	25.310.000,00	0,00
20	1.3.2.02.01.04.001.	00002	Sepeda Motor		7	2012	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00
21	1.3.2.02.01.04.001.	00002	Sepeda Motor		7	2011	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
22	1.3.2.02.01.04.001.	00002	Sepeda Motor		50	2010	21.666.667,00	0,00	21.666.667,00	0,00

Halaman 2 dari 11 Halaman										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	1.3.2.02.01.04.001.	00002	Sepeda Motor		7	2008	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	0,00
24	1.3.2.02.01.04.001.	00003	Sepeda Motor		7	2008	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
25	1.3.2.02.01.04.001.	00003	Sepeda Motor		7	2010	21.666.666,00	0,00	21.666.666,00	0,00
26	1.3.2.02.01.04.001.	00003	Sepeda Motor		7	2011	29.867.500,00	0,00	29.867.500,00	0,00
27	1.3.2.02.01.04.001.	00003	Sepeda Motor		7	2014	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
28	1.3.2.02.01.04.001.	00003	Sepeda Motor		7	2015	17.950.000,00	0,00	17.950.000,00	0,00
29	1.3.2.02.01.04.001.	00003	Sepeda Motor		7	2016	14.782.601,97	0,00	14.782.601,97	0,00
30	1.3.2.02.01.04.001.	00003	Sepeda Motor		7	2004	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
31	1.3.2.02.01.04.001.	00004	Sepeda Motor		7	2016	14.782.601,97	0,00	14.782.601,97	0,00
32	1.3.2.02.01.04.001.	00004	Sepeda Motor		7	2014	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
33	1.3.2.02.01.04.001.	00004	Sepeda Motor		7	2010	21.666.667,00	0,00	21.666.667,00	0,00
34	1.3.2.02.01.04.001.	00004	Sepeda Motor		7	2011	20.597.500,00	0,00	20.597.500,00	0,00
35	1.3.2.02.01.04.001.	00005	Sepeda Motor		7	2011	21.847.500,00	0,00	21.847.500,00	0,00
36	1.3.2.02.01.04.001.	00005	Sepeda Motor		7	2014	17.775.000,00	0,00	17.775.000,00	0,00
37	1.3.2.02.01.04.001.	00006	Sepeda Motor		7	2014	17.775.000,00	0,00	17.775.000,00	0,00
38	1.3.2.02.01.04.001.	00007	Sepeda Motor		7	2014	25.025.000,00	0,00	25.025.000,00	0,00
39	1.3.2.02.01.04.001.	00008	Sepeda Motor		7	2014	25.025.000,00	0,00	25.025.000,00	0,00
40	1.3.2.02.01.04.001.	00009	Sepeda Motor		7	2014	20.424.591,00	0,00	20.424.591,00	0,00
41	1.3.2.02.01.04.001.	00010	Sepeda Motor		7	2014	36.776.873,36	0,00	36.776.873,36	0,00
42	1.3.2.02.01.05.005.	00001	Sepeda Motor Roda 3		7	2014	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	0,00
43	1.3.2.02.03.02.001.	00001	Speed Boat / Motor Tempel		7	2013	39.716.000,00	0,00	39.716.000,00	0,00
44	1.3.2.02.03.02.001.	00001	Speed Boat / Motor Tempel		7	2014	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00
45	1.3.2.02.03.02.001.	00002	Speed Boat / Motor Tempel		7	2013	109.736.000,00	0,00	109.736.000,00	0,00
	1.3.2.03.		Sub Total - ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				91.047.284,76	1.013.156,95	89.020.970,86	2.026.313,90
46	1.3.2.03.03.01.072.	000001	Global Positioning System		5	2021	5.065.784,76	1.013.156,95	3.039.470,86	2.026.313,90
47	1.3.2.03.03.01.072.	00001	Global Positioning System		5	2009	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
48	1.3.2.03.03.01.072.	00001	Global Positioning System		5	2013	5.981.500,00	0,00	5.981.500,00	0,00
49	1.3.2.03.03.18.048.	00001	Optic Theodolite		5	2009	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.3.2.05.		Sub Total - ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				515.828.069,27	18.531.205,27	502.350.182,61	13.477.886,66
50	1.3.2.05.01.01.001.	00001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)		5	2014	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
51	1.3.2.05.01.01.001.	00001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)		5	2015	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
52	1.3.2.05.01.01.001.	00001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)		5	2016	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
53	1.3.2.05.01.01.001.	00002	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)		5	2016	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
54	1.3.2.05.01.01.001.	00002	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)		5	2015	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
55	1.3.2.05.01.04.002.	000001	Lemari Kayu		5	2020	7.555.704,14	1.511.140,83	6.044.563,31	1.511.140,83
56	1.3.2.05.01.04.002.	000002	Lemari Kayu		5	2020	5.037.808,61	1.007.561,72	4.030.246,89	1.007.561,72
57	1.3.2.05.01.04.002.	000003	Lemari Kayu		5	2020	5.037.808,61	1.007.561,72	4.030.246,89	1.007.561,72
58	1.3.2.05.01.04.002.	00001	Lemari Kayu		5	2018	4.019.766,36	0,00	4.019.766,36	0,00
59	1.3.2.05.01.04.002.	00001	Lemari Kayu		5	2019	4.748.110,37	949.622,07	4.748.110,37	0,00
60	1.3.2.05.01.04.002.	00001	Lemari Kayu		5	2015	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
61	1.3.2.05.01.04.002.	00001	Lemari Kayu		5	2016	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
62	1.3.2.05.01.04.002.	00002	Lemari Kayu		5	2016	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
63	1.3.2.05.01.04.002.	00002	Lemari Kayu		5	2015	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
64	1.3.2.05.01.04.002.	00002	Lemari Kayu		5	2019	4.748.110,37	949.622,07	4.748.110,37	0,00
65	1.3.2.05.01.04.002.	00002	Lemari Kayu		5	2018	4.019.766,36	0,00	4.019.766,36	0,00
66	1.3.2.05.01.04.002.	00003	Lemari Kayu		5	2018	4.019.766,36	0,00	4.019.766,36	0,00
67	1.3.2.05.01.04.002.	00003	Lemari Kayu		5	2016	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
68	1.3.2.05.01.04.002.	00004	Lemari Kayu		5	2016	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
69	1.3.2.05.01.04.002.	00004	Lemari Kayu		5	2018	4.019.766,36	0,00	4.019.766,36	0,00
70	1.3.2.05.01.04.002.	00005	Lemari Kayu		5	2016	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
71	1.3.2.05.01.04.002.	00006	Lemari Kayu		5	2016	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
72	1.3.2.05.01.04.004.	00001	Rak Kayu		5	2019	4.748.110,37	949.622,07	4.748.110,37	0,00
73	1.3.2.05.01.04.005.	00001	Filing Cabinet Besi		5	2019	4.748.110,38	949.622,08	4.748.110,38	0,00
74	1.3.2.05.01.04.005.	00002	Filing Cabinet Besi		5	2019	4.748.110,38	949.622,08	4.748.110,38	0,00
75	1.3.2.05.01.04.005.	00003	Filing Cabinet Besi		5	2019	4.748.110,38	949.622,08	4.748.110,38	0,00
76	1.3.2.05.01.04.005.	00004	Filing Cabinet Besi		5	2019	4.748.110,38	949.622,08	4.748.110,38	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	1.3.2.05.01.05.005.	00001	White Board		5	2015	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00
78	1.3.2.05.01.05.005.	00001	White Board		5	2016	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00
79	1.3.2.05.01.05.005.	00001	White Board		5	2018	2.512.353,98	0,00	2.512.353,98	0,00
80	1.3.2.05.01.05.005.	00001	White Board		5	2019	2.637.839,10	527.567,82	2.637.839,10	0,00
81	1.3.2.05.01.05.005.	00002	White Board		5	2019	2.637.839,10	527.567,82	2.637.839,10	0,00
82	1.3.2.05.01.05.005.	00002	White Board		5	2018	2.512.353,98	0,00	2.512.353,98	0,00
83	1.3.2.05.01.05.005.	00002	White Board		5	2016	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00
84	1.3.2.05.01.05.005.	00003	White Board		5	2019	2.637.839,10	527.567,82	2.637.839,10	0,00
85	1.3.2.05.01.05.012.	000001	Mesin Absensi		5	2021	4.761.837,68	952.367,54	2.857.102,61	1.904.735,07
86	1.3.2.05.01.05.012.	000001	Mesin Absensi		5	2022	7.332.537,15	1.466.507,43	2.933.014,86	4.399.522,29
87	1.3.2.05.01.05.091.	000001	Genset (Alat Kantor Lainnya)		5	2006	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
88	1.3.2.05.01.05.091.	00001	Genset (Alat Kantor Lainnya)		5	2008	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
89	1.3.2.05.01.05.091.	00001	Genset (Alat Kantor Lainnya)		5	2009	4.999.999,00	0,00	4.999.999,00	0,00
90	1.3.2.05.01.05.091.	00001	Genset (Alat Kantor Lainnya)		5	2015	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
91	1.3.2.05.02.01.003.	00001	Kursi Besi/Metal		5	2018	1.004.941,59	0,00	1.004.941,59	0,00
92	1.3.2.05.02.01.003.	00002	Kursi Besi/Metal		5	2018	1.004.941,59	0,00	1.004.941,59	0,00
93	1.3.2.05.02.01.003.	00003	Kursi Besi/Metal		5	2018	1.004.941,59	0,00	1.004.941,59	0,00
94	1.3.2.05.02.01.003.	00004	Kursi Besi/Metal		5	2018	1.004.941,59	0,00	1.004.941,59	0,00
95	1.3.2.05.02.01.003.	00005	Kursi Besi/Metal		5	2018	1.004.941,59	0,00	1.004.941,59	0,00
96	1.3.2.05.02.01.004.	00001	Kursi Kayu		5	2013	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00
97	1.3.2.05.02.01.024.	00001	Meja 1/2 Biro		5	2015	4.494.956,77	0,00	4.494.956,77	0,00
98	1.3.2.05.02.01.024.	00001	Meja 1/2 Biro		5	2016	4.349.299,07	0,00	4.349.299,07	0,00
99	1.3.2.05.02.01.024.	00001	Meja 1/2 Biro		5	2018	4.019.766,36	0,00	4.019.766,36	0,00
100	1.3.2.05.02.01.024.	00002	Meja 1/2 Biro		5	2018	4.019.766,36	0,00	4.019.766,36	0,00
101	1.3.2.05.02.01.024.	00002	Meja 1/2 Biro		5	2016	4.349.299,07	0,00	4.349.299,07	0,00
102	1.3.2.05.02.01.024.	00002	Meja 1/2 Biro		5	2015	4.494.956,77	0,00	4.494.956,77	0,00
103	1.3.2.05.02.01.024.	00003	Meja 1/2 Biro		5	2015	4.494.956,77	0,00	4.494.956,77	0,00
104	1.3.2.05.02.01.024.	00003	Meja 1/2 Biro		5	2016	4.349.299,07	0,00	4.349.299,07	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	1.3.2.05.02.01.024.	00003	Meja 1/2 Biro		5	2018	4.019.766,36	0,00	4.019.766,36	0,00
106	1.3.2.05.02.01.024.	00004	Meja 1/2 Biro		5	2018	4.019.766,36	0,00	4.019.766,36	0,00
107	1.3.2.05.02.01.024.	00004	Meja 1/2 Biro		5	2016	4.349.299,07	0,00	4.349.299,07	0,00
108	1.3.2.05.02.01.024.	00005	Meja 1/2 Biro		5	2016	4.349.299,07	0,00	4.349.299,07	0,00
109	1.3.2.05.02.01.024.	00006	Meja 1/2 Biro		5	2016	4.349.299,07	0,00	4.349.299,07	0,00
110	1.3.2.05.02.01.030.	00001	Kursi Rapat		5	2007	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
111	1.3.2.05.02.01.030.	00002	Kursi Rapat		5	2007	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
112	1.3.2.05.02.01.030.	00003	Kursi Rapat		5	2007	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
113	1.3.2.05.02.01.030.	00004	Kursi Rapat		5	2007	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
114	1.3.2.05.02.01.030.	00005	Kursi Rapat		5	2007	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
115	1.3.2.05.02.01.030.	00006	Kursi Rapat		5	2007	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
116	1.3.2.05.02.01.030.	00007	Kursi Rapat		5	2007	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
117	1.3.2.05.02.01.030.	00008	Kursi Rapat		5	2007	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
118	1.3.2.05.02.01.030.	00009	Kursi Rapat		5	2007	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
119	1.3.2.05.02.01.030.	00010	Kursi Rapat		5	2007	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
120	1.3.2.05.02.01.031.	00001	Kursi Tamu		5	2015	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
121	1.3.2.05.02.01.031.	00001	Kursi Tamu		5	2018	8.039.532,71	0,00	8.039.532,71	0,00
122	1.3.2.05.02.01.039.	00001	Meja Komputer		5	2015	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
123	1.3.2.05.02.01.039.	00002	Meja Komputer		5	2015	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
124	1.3.2.05.02.01.039.	00003	Meja Komputer		5	2015	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
125	1.3.2.05.02.01.057.	00001	Meja Kerja 1 Biro		5	2014	5.333.333,00	0,00	5.333.333,00	0,00
126	1.3.2.05.02.01.057.	00001	Meja Kerja 1 Biro		5	2015	4.865.129,61	0,00	4.865.129,61	0,00
127	1.3.2.05.02.01.057.	00001	Meja Kerja 1 Biro		5	2016	4.656.308,41	0,00	4.656.308,41	0,00
128	1.3.2.05.02.01.057.	00001	Meja Kerja 1 Biro		5	2018	5.024.707,95	0,00	5.024.707,95	0,00
129	1.3.2.05.02.01.057.	00002	Meja Kerja 1 Biro		5	2018	5.024.707,95	0,00	5.024.707,95	0,00
130	1.3.2.05.02.01.057.	00002	Meja Kerja 1 Biro		5	2014	5.333.333,00	0,00	5.333.333,00	0,00
131	1.3.2.05.02.01.057.	00003	Meja Kerja 1 Biro		5	2014	5.333.334,00	0,00	5.333.334,00	0,00
132	1.3.2.05.02.03.003.	00001	Mesin Pemotong Rumput		5	2017	4.739.000,00	0,00	4.739.000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	1.3.2.05.02.03.003.	00001	Mesin Pemotong Rumput		5	2018	3.517.295,56	0,00	3.517.295,56	0,00
134	1.3.2.05.02.04.001.	00001	Lemari Es		5	2012	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	0,00
135	1.3.2.05.02.04.004.	00001	A.C. Split		5	2007	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00
136	1.3.2.05.02.04.004.	00001	A.C. Split		5	2011	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	0,00
137	1.3.2.05.02.04.004.	00001	A.C. Split		5	2015	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
138	1.3.2.05.02.04.004.	00001	A.C. Split		5	2016	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
139	1.3.2.05.02.04.004.	00001	A.C. Split		5	2017	5.999.700,00	0,00	5.999.700,00	0,00
140	1.3.2.05.02.04.004.	00002	A.C. Split		5	2016	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
141	1.3.2.05.02.04.004.	00002	A.C. Split		5	2011	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	0,00
142	1.3.2.05.02.04.004.	00002	A.C. Split		5	2007	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00
143	1.3.2.05.02.04.004.	00003	A.C. Split		5	2007	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00
144	1.3.2.05.02.04.004.	00003	A.C. Split		5	2016	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
145	1.3.2.05.02.04.004.	00004	A.C. Split		5	2016	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
146	1.3.2.05.02.04.004.	00005	A.C. Split		5	2016	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
147	1.3.2.05.02.04.005.	00001	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)		5	2013	9.499.700,00	0,00	9.499.700,00	0,00
148	1.3.2.05.02.04.005.	00001	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)		5	2017	19.997.000,00	0,00	19.997.000,00	0,00
149	1.3.2.05.02.04.005.	00002	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)		5	2017	19.997.000,00	0,00	19.997.000,00	0,00
150	1.3.2.05.02.04.006.	00006	Kipas Angin		5	2011	1.109.250,00	0,00	1.109.250,00	0,00
151	1.3.2.05.02.04.006.	00007	Kipas Angin		5	2011	1.109.250,00	0,00	1.109.250,00	0,00
152	1.3.2.05.02.04.006.	00008	Kipas Angin		5	2011	1.109.250,00	0,00	1.109.250,00	0,00
153	1.3.2.05.02.05.002.	00001	Kompore Gas (Alat Dapur)		5	2007	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
154	1.3.2.05.02.05.011.	00001	Treng Air/Tandon Air		5	2017	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
155	1.3.2.05.02.06.002.	00001	Televisi		5	2019	5.803.246,01	1.160.649,20	5.803.246,01	0,00
156	1.3.2.05.02.06.038.	00001	Dispenser		5	2017	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
157	1.3.2.05.02.06.038.	00001	Dispenser		5	2019	3.692.974,74	738.594,95	3.692.974,74	0,00
158	1.3.2.05.02.06.038.	00002	Dispenser		5	2019	1.055.135,64	211.027,13	1.055.135,64	0,00
159	1.3.2.05.02.06.038.	00003	Dispenser		5	2019	1.055.135,64	211.027,13	1.055.135,64	0,00
160	1.3.2.05.02.06.038.	00004	Dispenser		5	2019	1.055.135,64	211.027,13	1.055.135,64	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	1.3.2.05.03.01.008.	000001	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		5	2021	4.559.206,29	911.841,26	2.735.523,77	1.823.682,52
162	1.3.2.05.03.01.008.	000002	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		5	2021	4.559.206,28	911.841,26	2.735.523,77	1.823.682,51
163	1.3.2.05.03.02.011.	00001	Meja Tamu Biasa		5	2010	6.336.000,20	0,00	6.336.000,20	0,00
164	1.3.2.05.03.03.006.	00001	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		5	2016	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
165	1.3.2.05.03.03.006.	00002	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		5	2016	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
166	1.3.2.05.03.03.006.	00003	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		5	2016	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
167	1.3.2.05.03.03.006.	00004	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		5	2016	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
168	1.3.2.05.03.03.006.	00005	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		5	2016	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
169	1.3.2.05.03.03.006.	00006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		5	2016	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
170	1.3.2.05.03.03.006.	00007	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		5	2016	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
171	1.3.2.05.03.03.006.	00008	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		5	2016	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
172	1.3.2.05.03.03.006.	00009	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		5	2016	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	1.3.2.06.		Sub Total - ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				86.800.864,00	4.445.172,80	84.750.474,82	2.050.389,18
173	1.3.2.06.01.01.041.	00001	Professional Sound System		5	2012	8.745.000,00	0,00	8.745.000,00	0,00
174	1.3.2.06.01.01.103.	00001	Kamera Outdoor		5	2019	15.621.283,13	3.124.256,63	15.621.283,13	0,00
175	1.3.2.06.01.02.126.	00001	Camera Digital		5	2007	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
176	1.3.2.06.01.02.126.	00001	Camera Digital		5	2008	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00
177	1.3.2.06.01.02.126.	00001	Camera Digital		5	2009	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
178	1.3.2.06.01.02.126.	00001	Camera Digital		5	2013	13.550.000,00	0,00	13.550.000,00	0,00
179	1.3.2.06.01.02.126.	00001	Camera Digital		5	2014	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
180	1.3.2.06.01.02.126.	00001	Camera Digital		5	2016	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00
181	1.3.2.06.01.06.002.	00001	Wireless (Studio)		5	2008	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
182	1.3.2.06.02.01.006.	00001	Handy Talky (HT)		5	2008	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
183	1.3.2.06.02.01.006.	00002	Handy Talky (HT)		5	2008	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
184	1.3.2.06.02.01.023.	00001	Handy Cam		5	2007	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
185	1.3.2.06.02.01.024.	00001	Power Megaphone		5	2008	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
186	1.3.2.06.02.06.007.	000001	Infocus (Alat Studio Komunikasi)		5	2020	2.957.215,84	591.443,17	2.365.772,67	591.443,17
187	1.3.2.06.02.06.007.	000001	Infocus (Alat Studio Komunikasi)		5	2021	3.647.365,03	729.473,01	2.188.419,02	1.458.946,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.3.2.10.		Sub Total - KOMPUTER				613.502.433,37	64.738.126,37	520.726.415,13	92.776.018,24
188	1.3.2.10.01.02.001.	000001	P.C Unit		5	2021	9.624.991,05	1.924.998,21	5.774.994,63	3.849.996,42
189	1.3.2.10.01.02.001.	000001	P.C Unit		5	2022	9.554.485,95	1.910.897,19	3.821.794,38	5.732.691,57
190	1.3.2.10.01.02.001.	000001	P.C Unit		5	2020	9.548.029,33	1.909.605,87	7.638.423,46	1.909.605,87
191	1.3.2.10.01.02.001.	000002	P.C Unit		5	2020	9.548.029,33	1.909.605,87	7.638.423,46	1.909.605,87
192	1.3.2.10.01.02.001.	000002	P.C Unit		5	2022	9.554.485,95	1.910.897,19	3.821.794,38	5.732.691,57
193	1.3.2.10.01.02.001.	000003	P.C Unit		5	2022	9.554.485,95	1.910.897,19	3.821.794,38	5.732.691,57
194	1.3.2.10.01.02.001.	00001	P.C Unit		5	2018	9.044.474,31	0,00	9.044.474,31	0,00
195	1.3.2.10.01.02.001.	00001	P.C Unit		5	2019	9.496.220,75	1.899.244,15	9.496.220,75	0,00
196	1.3.2.10.01.02.001.	00002	P.C Unit		5	2019	9.496.220,75	1.899.244,15	9.496.220,75	0,00
197	1.3.2.10.01.02.001.	00002	P.C Unit		5	2018	9.044.474,31	0,00	9.044.474,31	0,00
198	1.3.2.10.01.02.001.	00002	P.C Unit		5	2016	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	0,00
199	1.3.2.10.01.02.001.	00003	P.C Unit		5	2016	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	0,00
200	1.3.2.10.01.02.002.	000001	Lap Top		5	2020	12.291.889,85	2.458.377,97	9.833.511,88	2.458.377,97
201	1.3.2.10.01.02.002.	000001	Lap Top		5	2021	20.263.139,05	4.052.627,81	12.157.883,43	8.105.255,62
202	1.3.2.10.01.02.002.	000001	Lap Top		5	2022	11.677.705,04	2.335.541,01	4.671.082,02	7.006.623,02
203	1.3.2.10.01.02.002.	000002	Lap Top		5	2020	12.291.889,85	2.458.377,97	9.833.511,88	2.458.377,97
204	1.3.2.10.01.02.002.	000003	Lap Top		5	2020	12.291.889,85	2.458.377,97	9.833.511,88	2.458.377,97
205	1.3.2.10.01.02.002.	000004	Lap Top		5	2020	12.291.889,85	2.458.377,97	9.833.511,88	2.458.377,97
206	1.3.2.10.01.02.002.	00001	Lap Top		5	2006	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
207	1.3.2.10.01.02.002.	00001	Lap Top		5	2019	10.709.626,74	2.141.925,35	10.709.626,74	0,00
208	1.3.2.10.01.02.002.	00002	Lap Top		5	2019	10.709.626,74	2.141.925,35	10.709.626,74	0,00
209	1.3.2.10.01.02.002.	00003	Lap Top		5	2019	10.709.626,74	2.141.925,35	10.709.626,74	0,00
210	1.3.2.10.01.02.002.	00004	Lap Top		5	2019	10.709.626,74	2.141.925,35	10.709.626,74	0,00
211	1.3.2.10.01.02.003.	00001	Note Book		5	2010	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
212	1.3.2.10.01.02.003.	00001	Note Book		5	2018	9.496.698,02	0,00	9.496.698,02	0,00
213	1.3.2.10.01.02.003.	00001	Note Book		5	2016	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00
214	1.3.2.10.01.02.003.	00001	Note Book		5	2015	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00

Halaman 9 dari 11 Halaman										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	1.3.2.10.01.02.003.	00001	Note Book		5	2013	21.975.000,00	0,00	21.975.000,00	0,00
216	1.3.2.10.01.02.003.	00002	Note Book		5	2014	6.333.334,00	0,00	6.333.334,00	0,00
217	1.3.2.10.01.02.003.	00002	Note Book		5	2011	11.850.000,00	0,00	11.850.000,00	0,00
218	1.3.2.10.01.02.003.	00002	Note Book		5	2015	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00
219	1.3.2.10.01.02.003.	00002	Note Book		5	2016	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00
220	1.3.2.10.01.02.003.	00002	Note Book		5	2010	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
221	1.3.2.10.01.02.003.	00003	Note Book		5	2010	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
222	1.3.2.10.01.02.003.	00003	Note Book		5	2016	6.791.269,35	0,00	6.791.269,35	0,00
223	1.3.2.10.01.02.003.	00003	Note Book		5	2015	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00
224	1.3.2.10.01.02.003.	00004	Note Book		5	2014	6.333.333,00	0,00	6.333.333,00	0,00
225	1.3.2.10.01.02.003.	00004	Note Book		5	2016	6.791.269,35	0,00	6.791.269,35	0,00
226	1.3.2.10.01.02.003.	00005	Note Book		5	2016	6.791.269,35	0,00	6.791.269,35	0,00
227	1.3.2.10.01.02.003.	00005	Note Book		5	2010	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
228	1.3.2.10.01.02.003.	00005	Note Book		5	2012	8.304.500,00	0,00	8.304.500,00	0,00
229	1.3.2.10.01.02.003.	00008	Note Book		5	2016	13.340.271,47	0,00	13.340.271,47	0,00
230	1.3.2.10.01.02.009.	000001	Tablet PC		5	2022	15.924.143,24	3.184.828,65	6.369.657,30	9.554.485,94
231	1.3.2.10.02.03.003.	000001	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2021	4.052.627,81	810.525,56	2.431.576,69	1.621.051,12
232	1.3.2.10.02.03.003.	000001	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2020	7.545.616,42	1.509.123,28	6.036.493,14	1.509.123,28
233	1.3.2.10.02.03.003.	000001	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2022	3.715.633,42	743.126,68	1.486.253,37	2.229.380,05
234	1.3.2.10.02.03.003.	000002	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2022	3.715.633,42	743.126,68	1.486.253,37	2.229.380,05
235	1.3.2.10.02.03.003.	000002	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2020	7.545.616,42	1.509.123,28	6.036.493,14	1.509.123,28
236	1.3.2.10.02.03.003.	000002	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2021	6.585.520,19	1.317.104,04	3.951.312,11	2.634.208,08
237	1.3.2.10.02.03.003.	000003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2020	7.545.616,42	1.509.123,28	6.036.493,14	1.509.123,28
238	1.3.2.10.02.03.003.	000003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2022	3.715.633,42	743.126,68	1.486.253,37	2.229.380,05
239	1.3.2.10.02.03.003.	000004	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2020	7.545.616,42	1.509.123,28	6.036.493,14	1.509.123,28
240	1.3.2.10.02.03.003.	000004	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2022	3.715.633,42	743.126,68	1.486.253,37	2.229.380,05
241	1.3.2.10.02.03.003.	000005	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2022	4.246.438,20	849.287,64	1.698.575,28	2.547.862,92
242	1.3.2.10.02.03.003.	000005	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2020	3.495.395,84	699.079,17	2.796.316,67	699.079,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	1.3.2.10.02.03.003.	000006	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2020	3.495.395,84	699.079,17	2.796.316,67	699.079,17
244	1.3.2.10.02.03.003.	000007	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2020	3.495.395,84	699.079,17	2.796.316,67	699.079,17
245	1.3.2.10.02.03.003.	00001	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2015	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00
246	1.3.2.10.02.03.003.	00001	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2017	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
247	1.3.2.10.02.03.003.	00001	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2018	3.014.824,77	0,00	3.014.824,77	0,00
248	1.3.2.10.02.03.003.	00001	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2019	7.913.517,29	1.582.703,46	7.913.517,29	0,00
249	1.3.2.10.02.03.003.	00001	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2016	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
250	1.3.2.10.02.03.003.	00002	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2019	7.913.517,29	1.582.703,46	7.913.517,29	0,00
251	1.3.2.10.02.03.003.	00002	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2015	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
252	1.3.2.10.02.03.003.	00002	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2016	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
253	1.3.2.10.02.03.003.	00003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2016	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00
254	1.3.2.10.02.03.003.	00003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2019	3.692.974,74	738.594,95	3.692.974,74	0,00
255	1.3.2.10.02.03.003.	00004	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2016	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00
256	1.3.2.10.02.03.003.	00005	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2016	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00
257	1.3.2.10.02.03.003.	00006	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2016	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00
258	1.3.2.10.02.03.003.	00006	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2015	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00
259	1.3.2.10.02.03.003.	00007	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2015	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00
260	1.3.2.10.02.03.003.	00007	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2016	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
261	1.3.2.10.02.03.003.	00008	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2015	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00
262	1.3.2.10.02.03.003.	00010	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2016	3.801.083,59	0,00	3.801.083,59	0,00
263	1.3.2.10.02.05.003.	00001	Hardisk		5	2019	1.582.703,46	316.540,69	1.582.703,46	0,00
264	1.3.2.10.02.05.011.	000001	Ipada		5	2022	15.924.143,24	3.184.828,65	6.369.657,30	9.554.485,94
	1.3.3.01.		Sub Total - BANGUNAN GEDUNG				4.613.472.669,64	113.974.740,77	1.245.536.451,82	3.367.936.217,82
265	1.3.3.01.01.01.001.	00001	Bangunan Gedung Kantor Permanen		40	1996	613.931.000,00	14.485.704,03	251.788.399,22	362.142.600,78
266	1.3.3.01.01.01.005.	0001	Pagar Bangunan Gedung Kantor		40	2013	41.669.148,05	1.041.728,70	11.459.015,71	30.210.132,34
267	1.3.3.01.01.01.005.	0001	Pagar Bangunan Gedung Kantor		40	2015	162.344.365,00	4.058.609,13	36.527.482,13	125.816.882,88
268	1.3.3.01.01.10.004.	000001	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan		40	2021	868.228.706,45	21.705.717,66	65.117.152,98	803.111.553,47
269	1.3.3.01.01.14.001.	0001	Gedung Garasi/Pool Permanen		40	2010	41.000.000,00	1.025.000,00	14.350.000,00	26.650.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	1.3.3.01.01.28.001.	00001	Bangunan Industri Makanan		40	2007	1.243.804.000,00	30.595.595,00	478.914.125,00	764.889.875,00
271	1.3.3.01.01.28.001.	0001	Bangunan Industri Makanan		40	2017	1.037.068.990,00	25.926.724,75	181.487.073,25	855.581.916,75
272	1.3.3.01.01.28.015.	0001	Bangunan Industri Tekstil		40	2012	63.000.000,00	1.575.000,00	18.900.000,00	44.100.000,00
273	1.3.3.01.01.28.015.	0001	Bangunan Industri Tekstil		40	2013	128.545.000,00	3.213.625,00	35.349.875,00	93.195.125,00
274	1.3.3.01.01.28.015.	0001	Bangunan Industri Tekstil		40	2015	214.981.460,14	5.374.536,50	48.370.828,53	166.610.631,61
275	1.3.3.01.01.33.005.	00001	Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen		40	2013	99.900.000,00	2.497.500,00	27.472.500,00	72.427.500,00
276	1.3.3.01.02.01.002.	0001	Rumah Negara Golongan I Tipe A Semi Permanen		40	1996	34.000.000,00	850.000,00	23.800.000,00	10.200.000,00
277	1.3.3.01.02.05.001.	0001	Asrama Permanen		40	1992	65.000.000,00	1.625.000,00	52.000.000,00	13.000.000,00
	1.3.3.04.		Sub Total - TUGU TITIK KONTROL/PASTI				981.498.471,61	22.577.526,84	223.129.053,75	758.369.417,86
278	1.3.3.04.01.04.001.	000001	Pagar Permanen		40	2023	205.077.480,00	5.126.937,00	5.126.937,00	199.950.543,00
279	1.3.3.04.01.04.001.	00001	Pagar Permanen		40	2006	776.420.991,61	17.450.589,84	218.002.116,75	558.418.874,86
	1.3.4.01.		Sub Total - JALAN DAN JEMBATAN				9.198.826.009,68	821.648.258,37	6.346.579.768,43	2.852.246.241,25
280	1.3.4.01.01.05.001.	0001	Jalan Desa		10	2014	997.800.500,00	99.780.050,00	997.800.500,00	0,00
281	1.3.4.01.01.05.001.	0001	Jalan Desa		10	2017	1.413.690.000,00	141.369.000,00	989.583.000,00	424.107.000,00
282	1.3.4.01.01.05.001.	0001	Jalan Desa		10	2018	194.962.688,10	19.496.268,81	116.977.612,86	77.985.075,24
283	1.3.4.01.01.05.001.	0002	Jalan Desa		10	2017	1.198.912.000,00	119.891.200,00	839.238.400,00	359.673.600,00
284	1.3.4.01.01.05.001.	0002	Jalan Desa		10	2014	997.800.500,00	99.780.050,00	997.800.500,00	0,00
285	1.3.4.01.01.05.001.	0003	Jalan Desa		10	2017	3.193.464.954,81	301.791.625,48	1.986.298.452,89	1.207.166.501,92
286	1.3.4.01.01.10.001.	0001	Jalan Rabat Beton		10	2013	223.545.366,77	19.967.064,08	203.578.302,69	19.967.064,08
287	1.3.4.01.02.05.001.	0001	Jembatan Pada Jalan Desa		50	2013	978.650.000,00	19.573.000,00	215.303.000,00	763.347.000,00
	1.3.4.04.		Sub Total - JARINGAN				83.519.832,39	1.921.380,81	18.192.884,86	65.326.947,53
288	1.3.4.04.02.03.002.	0001	Jaringan Listrik Kantor		40	2010	83.519.832,39	1.921.380,81	18.192.884,86	65.326.947,53
TOTAL							17.948.838.048,56	1.054.846.145,56	10.764.645.729,24	7.184.192.319,32

No. Urut.	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	01.		TANAH	0	0,00	
		1.3.1.01.	TANAH	0	0,00	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	27	172.853.103,46	
		1.3.2.01.	ALAT BESAR	0	0,00	
		1.3.2.02.	ALAT ANGKUTAN	0	0,00	
		1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0	0,00	
		1.3.2.04.	ALAT PERTANIAN	1	8.000.000,00	
		1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	4	21.617.500,00	
		1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	3	9.399.000,00	
		1.3.2.07.	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0	0,00	
		1.3.2.08.	ALAT LABORATORIUM	0	0,00	
		1.3.2.09.	ALAT PERSENJATAAN	0	0,00	
		1.3.2.10.	KOMPUTER	19	133.836.603,46	
		1.3.2.11.	ALAT EKSPLORASI	0	0,00	
		1.3.2.12.	ALAT PENGEBORAN	0	0,00	
		1.3.2.13.	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0,00	
		1.3.2.14.	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0,00	
		1.3.2.15.	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0,00	
		1.3.2.16.	ALAT PERAGA	0	0,00	
		1.3.2.17.	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0,00	
		1.3.2.18.	RAMBU - RAMBU	0	0,00	
		1.3.2.19.	PERALATAN OLAH RAGA	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0,00	
		1.3.3.01.	BANGUNAN GEDUNG	0	0,00	
		1.3.3.02.	MONUMEN	0	0,00	
		1.3.3.03.	BANGUNAN MENARA	0	0,00	
		1.3.3.04.	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0,00	
		1.3.3.05.	RAMBU - RAMBU	0	0,00	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0	0,00	
		1.3.4.01.	JALAN DAN JEMBATAN	0	0,00	
		1.3.4.02.	BANGUNAN AIR	0	0,00	
		1.3.4.03.	INSTALASI	0	0,00	
		1.3.4.04.	JARINGAN	0	0,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01.	BAHAN PERPUSTAKAAN	0	0,00	
		1.3.5.02.	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0	0,00	
		1.3.5.03.	HEWAN	0	0,00	
		1.3.5.04.	BIOTA PERAIRAN	0	0,00	
		1.3.5.05.	TANAMAN	0	0,00	
		1.3.5.06.	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0,00	
		1.3.5.07.	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0,00	
6	06.		KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		1.3.6.01.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
		1.3.5.08.	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
TOTAL				27	172.853.103,46	

.....,

Mengetahui
Kepala SKPD

Pengurus Barang

ELISABET ROSLIN, SH., M.Si.
NIP. 19671105 199003 2 010

ALLY, S.A.P.
NIP. 19690809 199003 1 004

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023**

**B A B I
PENDAHULUAN**

A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD ;

Penyusunan Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan ***Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi*** per 31 Desember 2023, yang meliputi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja dan Beban yang terjadi selama tahun 2023 serta saldo asset tahun-tahun sebelumnya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tujuan kebijakan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penyajian Informasi laporan keuangan dan penggunaan sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh ***Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi*** serta menunjukkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang memadai kepada pengguna laporan keuangan ini dalam mengambil suatu keputusan.

B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

- (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (4) PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
- (5) PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- (6) PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (7) Perda 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
- (8) Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (9) Permendagri 79 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD.

B A B II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN

PENCAPAIAN TARGET KERJA

A. Ekonomi Makro

Secara Ekonomi Makro adanya perubahan anggaran APBD dimasa APBD Perubahan ditetapkan. Perubahan anggaran yang terjadi yaitu bertambahnya belanja daerah di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Khususnya Belanja barang jasa dan belanja modal.

B. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pengelolaan keuangan pada ***Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi*** Kabupaten Kapuas Hulu, mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Program Pencapaian Target Kinerja

Dari program yang dilaksanakan ***Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi*** Tahun 2023 masing-masing Indikator Pencapaian target kinerja sebagai berikut :

- a. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota**
dengan indikator Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen RKA-SKPD, Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Jumlah Dokumen DPA-SKPD, Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD, Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD, Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN , Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD, Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan, Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara. Rencana target 100%, realisasi tingkat pencapaian target adalah 94,09%. Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.541.878.886 realisasi belanja sebesar Rp. 5.214.614.373.

- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** dengan indikator Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n, Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina. Rencana pencapaian target 100%, realisasi tingkat pencapaian target adalah 100%. Pagu Anggaran sebesar Rp. 42.988.900,00 realisasi belanja sebesar Rp. 42.988.900,00.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja** dengan indikator Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL. Rencana pencapaian target 100%, realisasi tingkat pencapaian target adalah

100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 18.036.500,00, realisasi belanja sebesar Rp. 18.036.500,00.

- d. **Program Hubungan Industrial** dengan indikator Jumlah Perselisihan yang Dicegah, Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan. Rencana pencapaian target 100%, realisasi tingkat pencapaian target adalah 100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 38.975.000,00, realisasi belanja sebesar Rp. 38.975.000,00.
- e. **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri** dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Rencana pencapaian target 100%, realisasi tingkat pencapaian target adalah 99,77%. Pagu anggaran sebesar Rp. 1.075.938.700,00, realisasi belanja sebesar Rp. 1.073.421.171,00.
- f. **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Rencana pencapaian target 100%, realisasi tingkat pencapaian target adalah 100%. Pagu Anggaran sebesar Rp. 227.339.600,00, realisasi belanja sebesar Rp. 227.339.600,00.
- g. **Program Pengembangan Kawasan Transigrasi** dengan indikator Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan. Rencana pencapaian target 100%, realisasi tingkat pencapaian target adalah 99.99 %. Pagu anggaran sebesar Rp. 132.751.000,00, realisasi belanja sebesar Rp. 132.735.750,00.

B A B III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar realisasi pencapaian dan target kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi .

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan sebesar Rp. 7.077.908.586,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 6.881.608.586,00 dan belanja modal sebesar Rp. 196.300.000,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2023	%
	BELANJA DAERAH	7.077.908.586,00	6.737.459.706,00	95,19
1	BELANJA OPERASI	6.881.608.586,00	6.541.902.226,00	95,06
	Belanja Pegawai	3.790.788.016,00	3.457.222.261,00	91,20
	Belanja Barang dan Jasa	2.571.820.570,00	2.568.890.724,00	99,89
	Hibah	519.000.000,00	515.789.241,00	99,38
	Bantuan Sosial	-	-	-
2	BELANJA MODAL	196.300.000,00	195.557.480,00	99,62
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	196.300.000,00	195.557.480,00	99,62

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp. 6.737.459.706,00 atau 95.19% dengan demikian masih ada yang tidak dapat terserap sebesar 4,81 % yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. **Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota** dengan kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub kegiatan koordinasi dan

penyusunan dokumen RKA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD, sub kegiatan koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan asn, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn, sub kegiatan pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd, sub kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester skpd, sub kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dan sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dan sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga, sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Rencana target 100%, realisasi tingkat pencapaian target adalah 94,09%. Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.541.878.886 realisasi belanja sebesar Rp. 5.214.614.373.

- b. **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** dengan Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan sub kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana. Kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Rencana pencapaian target 100%, realisasi tingkat pencapaian target adalah 100%. Pagu Anggaran sebesar Rp. 42.988.900,00 realisasi belanja sebesar Rp. 42.988.900,00.
- c. **Program Penempatan Tenaga Kerja** dengan kegiatan pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota dan sub kegiatan pelayanan antar kerja. Rencana pencapaian target 100%, realisasi tingkat pencapaian target adalah 100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 18.036.500,00, realisasi belanja sebesar Rp. 18.036.500,00.
- d. **Program Hubungan Industrial** dengan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota dan sub kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota, kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rencana pencapaian target 100%, realisasi tingkat pencapaian target adalah 100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 38.975.000,00, realisasi belanja sebesar Rp. 38.975.000,00.
- h. **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri** dengan kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota dan sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri, sub

kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat. Rencana pencapaian target 100%, realisasi tingkat pencapaian target adalah 99,77%. Pagu anggaran sebesar Rp. 1.075.938.700,00, realisasi belanja sebesar Rp. 1.073.421.171,00.

- i. **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** dengan kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Rencana pencapaian target 100%, realisasi tingkat pencapaian target adalah 100%. Pagu Anggaran sebesar Rp. 227.339.600,00, realisasi belanja sebesar Rp. 227.339.600,00.

- e. **Program Pengembangan Kawasan Transigrasi** dengan kegiatan pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian dan sub kegiatan penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman. Rencana pencapaian target 100%, realisasi tingkat pencapaian target adalah 99.99 %. Pagu anggaran sebesar Rp. 132.751.000,00, realisasi belanja sebesar Rp. 132.735.750,00.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah ***Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi*** sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrual untuk pengakuan Pendapatan dan Beban LO dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis kas adalah pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

(1) Prinsip Nilai Historis;

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan

dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

(2) Prinsip Realisasi;

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

(3) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal;

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Prinsip Periodisitas;

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

(5) Prinsip Konsistensi;

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(6) Prinsip Pengungkapan Lengkap;

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

(7) Prinsip Penyajian Wajar;

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

1. Aset

1) Kas di Kas daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara umum Daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian Jumlah Kas di kas daerah; Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan Kas yang merupakan titipan pihak ketiga.

2) Kas di Bendahara

Kas di Bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara; dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara.

3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang dilakukan pada akhir tahun. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal.

4) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke

dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi bagian lancar TGR menurut umur dan klasifikasi bagian lancar TGR menurut debitor.

5) Piutang Pajak

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya (SKRD dan SKRDT) pada tanggal pelaporan tetapi belum ada realisasinya.

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui pada tanggal pelaporan berdasarkan inventarisasi.

Perkiraan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dicatat sebesar nilai nominal.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

6) Piutang Lain-Lain

Akun Piutang Lain-Lain digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi. Piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya piutang/tagihan lain-lain kepada debitor.

Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang lain-lain di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

7) Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik.

Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

8) Investasi Non Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen, antara lain dapat berupa:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan,
- Bantuan ternak bergulir.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada tanggal perolehan.

9) Investasi Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen ini dapat berupa :

- Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

10) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan tanah dilakukan bila tanah telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Suatu tanah dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau dijual.

Tanah yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Tanah yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian kembali atau revaluasi tanah dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan pos tanah sebagai berikut: Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat tanah.

11) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Laporan keuangan mengungkapkan Penambahan; Pelepasan/penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi peralatan dan mesin lainnya.

12) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau

biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

13) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila Jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

14) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan aset tetap lainnya dilakukan bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aset tetap lainnya yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan aset tetap lainnya.

15) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan bila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

16) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Mengacu pada metode dan masa manfaat yang telah ditetapkan didalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

17) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah

dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut umur dan klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.

18) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan perbendaharaan diakui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan.

Tuntutan ganti rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM).

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

19) Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Aset Lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatatnya (carrying amount).

2. Utang/Kewajiban

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

3. Ekuitas Dana

Tujuan Kebijakan akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban.

Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup: definisi, pengakuan dan pengungkapan kewajiban.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

B A B V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Rincian dan penjelasan pos-pos pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

1. Penjelasan Pos – pos Laporan Realisasi Anggaran

1.1. Pendapatan

Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi tidak mengelola pendapatan.

1.2. Belanja

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, honorarium pengelola keuangan dengan rincian realisasi belanja per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

NO	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%
1	Belanja Pegawai	3.790.788.016,00	3.457.222.261,00	91,20
2	Belanja Gaji Pokok ASN	1.862.492.175,00	1.664.720.840,00	89,38
3	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	210.761.648,00	183.391.666,00	87,01
4	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	98.990.250,00	98.085.000,00	99,09
5	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	53.932.500,00	52.650.000,00	97,62
6	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	57.096.500,00	45.660.000,00	79,97
7	Belanja Tunjangan Beras ASN	112.808.634,00	94.073.580,00	83,39
8	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.786.990,00	2.779.732,00	99,74
9	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.286,00	20.673,00	70,59
10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	118.240.947,00	106.768.304,00	90,30
11	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.891.534,00	3.416.801,00	87,80
12	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.674.614,00	10.250.465,00	87,80
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.055.962.938,00	999.285.200,00	94,63
14	Belanja Honorarium	202.120.000,00	196.120.000,00	97,03

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk kegiatan Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi yakni sebagai kegiatan Belanja kegiatan harian kantor serta belanja jasa lainnya. Anggaran Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp. 2.571.820.570,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.568.890.724,00 atau 98,88%. Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Persentase (%)
	Belanja Barang dan Jasa	2.571.820.570,00	2.568.890.724,00	99,89
1	Belanja Barang Pakai Habis	487.557.600,00	486.689.750,00	99,82
2	Belanja Barang tak Habis Pakai	2.548.800,00	2.548.800,00	100,00
3	Belanja Jasa Kantor	610.349.000,00	608.467.634,00	98,69
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22.679.570,00	22.498.940,00	99,20
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
6	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.310.000,00	120.310.000,00	100,00
7	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.940.000,00	38.940.000,00	100,00
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.321.275.600,00	1.321.275.600,00	100,00
9	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-

c. Belanja Modal

Belanja Modal dilakukan untuk menunjang kegiatan dengan pengadaan barang tetap berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun, dengan anggaran sebesar Rp. . 196.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp195.557.480,00 atau 99,62% dengan rincian sesuai tabel dibawah :

NO	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
	TOTAL BELANJA MODAL	196.300.000,00	195.557.480,00	99,62
1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	196.300.000,00	195.557.480,00	99,62

d. Belanja Hibah

Belanja hibah barang kepada Kelompok Industri Kecil Menengah (IKM) dengan anggaran sebesar Rp. 519.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 515.789.241,00 atau 99,38 %. Hibah Barang diberikan pada 8 Desa dengan masing-masing desa memiliki 1 kelompok.

RINCIAN PENERIMA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TA 2023
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	Penerima Hibah		Keperluan Hibah	Anggaran (Rp)	Pencairan Dana			Rekening Penerima (Untuk Hibah Berupa Uang)			SK Bupati		Usulan /Proposal dari Penerima Hibah (Sudah /Belum)	Penerima Hibah telah Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pada Kepala Daerah (Sudah/Belum)
	Nama	Alamat			No. SP2D	Tanggal I SP2D	Nilai (Rp)	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama	Nomor dan Tanggal	Nilai Hibah (Rp)		
5.1.05.05 .02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			519.000.000,00			515.789.241,00							
1	Kelompok Burung Kenyalang Laja Sandang	Desa Laja Sandang Kecamatan Empanang	Bantuan Benang Tenun	38.500.000,00									Sudah	Sudah
2	Kelompok Kantuk Asam Jaya	Desa Kantuk Asam Kecamatan Puring Kencana	Bantuan Benang Tenun	80.000.000,00									Sudah	Sudah
3	Kelompok Bukit Tuga	Desa Kantuk Bunut Kecamatan Puring Kencana	Bantuan Benang Tenun	49.200.000,00									Sudah	Sudah
4	Kelompok Kemantan Permai	Desa Sungai Antu Kecamatan Puring kencana	Bantuan Benang Tenun	30.100.000,00									Sudah	Sudah
5	Kelompok Semerah Merapi	Desa Langau Kecamatan Puring Kencana	Bantuan Manik-manik	40.000.000,00									Sudah	Sudah

6	Kelompok Sayanan Pameang	Desa Labian Kecamatan Batang Lupa	Bantuan Manik-manik	27.000.000,00									Sudah	Sudah
7	Kelompok Kreatif Pandai Besi	Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau	Bantuan Pandai Besi	63.000.000,00									Sudah	Sudah
8	Kelompok Citra Pesona Tamao	Desa Tamao Kecamatan Embaloh Hulu	Bangunan Galery Kerajinan	83.600.000,00									Sudah	Sudah
9	Kelompok Nguji Menua Sadap	Desa Manua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu	Bangunan Galery Kerajinan	83.600.000,00									Sudah	Sudah

2. Penjelasan Pos – Pos Neraca

a. Aset Lancar

Tidak terdapat kas bendahara pengeluaran, dan persediaan habis pakai pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi per 31 Desember 2023.

b. Aset Tetap

Merupakan aset tetap yang saat ini berada dalam penguasaan dan dimanfaatkan sebagai penunjang operasional pemerintahan sehari-hari di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Aset Tetap Tanah

Saldo Aset tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 89.255.000,00 Tidak mengalami koreksi akibat inventarisasi, mutasi, penambahan atau pengurangan aset, saldo per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp.89.255.500,00 dan nilai buku per 31 desember 2023 sebesar Rp. 89.255.500,00

2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin – Alat-alat Angkutan

Merupakan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.764.342.413,84 tidak terdapat belanja modal alat angkutan pada tahun 2023 Terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp. 1.734.359.526,97 Beban Penyusutan Tahun 2023 Sebesar Rp. 5.996.577,37 Nilai Buku aset tetap Peralatan dan Mesin – Alat angkutan/kendaraan sebesar Rp. 29.982.886,87

3. Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

Merupakan saldo per 31 desember 2022 sebesar Rp. 91.047.284,76 terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp. 89.020.970,86 dan beban penyusutan sebesar Rp. 1.013.156,95 sehingga nilai buku per 31 Desemeber 2023 sebesar Rp. 2.026.313,91

4. Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Merupakan saldo per 31 desember 2022 sebesar Rp. 515.828.069,27 Terdapat akumulasi penyusutan dengan metode Garis Lurus Rp. 502.350.182,61 Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp. 18.531.205,27 sehingga Nilai buku Aset

tetap Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 desember 2023 Rp. 13.477.886,66

5. Aset Tetap Peralatan dan Mesin – Alat-alat Komputer
Merupakan saldo per 31 desember 2022 sebesar Rp. 613.502.433,37 Terdapat akumulasi penyusutan pada aset Alat Komputer sebesar Rp. 520.726.415,13 Beban penyusutan sebesar Rp. 64.738.126,37 sehingga Nilai buku aset tetap alat komputer per 31 desember 2023 Sebesar Rp. 92.776.018,24.
6. Aset Tetap Peralatan dan Mesin – Alat-alat Studio dan Komunikasi
Merupakan saldo per 31 desember 2022 sebesar Rp. 86.800.864,00 Terdapat akumulasi penyusutan dengan metode Garis Lurus pada Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp. 84.750.474,82 Beban Penyusutan sebesar 4.445.172,80 sehingga Nilai buku Aset tetap Alat Studio dan Komunikasi per 31 desember 2023 sebesar Rp. 2.050.389,18
7. Aset Tetap Gedung dan Bangunan Gedung Kantor, rumah, mess dan lainnya
Aset gedung kantor saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.613.472.669 Terdapat akumulasi penyusutan dengan metode Garis Lurus pada Gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.245.536.451,82 Beban Penyusutan sebesar Rp. 113.974.740,77 sehingga Nilai buku Aset tetap Gedung dan bangunan per 31 desember 2023 sebesar Rp. 3.367.936.217,82
8. Aset Tetap Gedung dan Bangunan Monumen dan Tugu
Aset Monumen dan Tugu saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 776.420.991,61 terdapat aset masuk dari belanja modal pada tahun 2023 sebesar Rp. 195.557.480,00 dan atribusi belanja penunjang sebesar Rp. 9.520.000,00 sehingga saldo per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp. 981.498.471,61 Terdapat akumulasi penyusutan dengan metode Garis Lurus pada Aset Monumen dan Tugu sebesar Rp. 223.129.053,75 Beban Penyusutan sebesar Rp. 22.577.526,84 sehingga Nilai buku Aset Monumen dan Tugu per 31 desember 2023 sebesar Rp. 758.369.417,86

9. Aset Tetap Jalan dan Jembatan

Aset jalan dan jembatan saldo per 31 desember 2022 senilai Rp. 9.198.826.009,68 tidak dapat koreksi asset. sehingga saldo per 31 desember 2023 sebesar Rp. 9.198.826.009.68 akumulasi penyusutan sebesar Rp. 6.346.579.768,43 Beban Penyusutan sebesar Rp. 821.648.258.37 Nilai Buku per 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 2.852.246.241,25

10. Aset Tetap Instalasi dan Jaringan

Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 83.519.832,39.- tidak dapat koreksi asset sehingga saldo per 31 desember 2023 adalah Rp. 83.519.832,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp. 18.192.884,86 Beban Penyusutan sebesar Rp. 1.921.380.81 Nilai Buku per 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 65.326.947,53

c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Penyusutan Aset tetap, maka Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi telah melakukan penyusutan berdasarkan masa manfaat sesuai kertas kerja penyusutan per 31 desember 2023. akumulasi penyusutan aset tetap per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp. (10.764.645.729,24) dan beban penyusutan sebesar Rp. (1.054.846.145,56).

d. Aset Tetap Lainnya

Terdiri dari saldo per 31 Desember 2022 yang Merupakan barang bercorak seni dan budaya senilai dan perpustakaan Rp. 2.000.000.-. pada barang bercorak Seni dan Budaya. Tidak terdapat akumulasi penyusutan pada barang bercorak seni dan budaya. Sehingga nilai buku aset tetap lainnya barang bercorak seni dan budaya senilai perpustakaan per 31 desember 2023 Rp. 2.000.000

e. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Terdiri dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 353.010.262.38 Tidak terdapat akumulasi penyusutan dan beban penyusutan pada Aset tersebut sehingga saldo per 31 Desember 2023 Tetap sebesar Rp. 353.010.262.38.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan selisih aset dengan kewajiban yang pada posisi 31 desember 2020 dengan jumlah sebesar Rp.9.627.711.308.19 dan 2021 sebesar Rp. 9.408.158.426.41.

f. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

a. Pendapatan- LO

Tidak terdapat pendapatan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi per 31 Desember 2023

b. Beban – LO

Jumlah beban pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2023
	BELANJA OPERASI	9,060,572,194.95
1	Belanja Gaji Pokok ASN	1.664.720.840,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	183.391.666,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	98.085.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	52.650.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	45.660.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	94.073.580,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.779.732,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.673,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	106.768.304,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.416.801,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.250.465,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	999.285.200,00
13	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	186.600.000,00
14	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.520.000,00
16	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	78.704.400,00
17	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.932.000,00
18	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	21.469.000,00
19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	123.320.200,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	65.501.950,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.520.000,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	67.341.200,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24,429,000.00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.723.000,00
26	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-
27	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.200.000,00
28	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.800.000,00

29	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	52.680.000,00
30	Belanja Pakaian Olahraga	14.040.000,00
31	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.450.000,00
33	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	499.550.000,00
34	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	22.200.000,00
35	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.461.000,00
37	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	770.000,00
38	Belanja Tagihan Telepon	406.992,00
39	Belanja Tagihan Air	9.996.100,00
40	Belanja Tagihan Listrik	39.544.942,00
41	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.800.000,00
42	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00
43	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.788.600,00
44	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	19.982.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.118.640,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.398.300,00
45	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.500.000,00
48	Belanja Sewa Bangunan Parkir	3.600.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	94.500.000,00
52	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00
54	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	19.710.000,00
55	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	38,940,000.00
56	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	665.550.600,00
57	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	655.725.000,00
59	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	515.789.241,00
62	Beban Penyusutan	1.054.846.145,56

c. Beban Perjalanan Dinas

Merupakan seluruh beban perjalanan dinas pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi per 31 desember 2023 sebesar Rp 1.321.275.600,00

d. Beban Penyusutan

Beban penyusutan aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp 1.128741.604.54

e. Beban Hibah

Merupakan seluruh beban Hibah pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi per 31 desember 2023 sebesar Rp. 1.321.275.600,00

g. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

a. Ekuitas awal

Merupakan ekuitas akhir Neraca per 31 Desember 2022 yang menjadi ekuitas awal tahun 2023 Rp. 8.399.281.797,26 terdiri dari aset tetap setelah memperhitungkan penyusutan Aset.

b. surplus/ Defisit LO

Merupakan defisit antara pendapatan LO dan beban LO Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebesar (Rp. 7.585.674.221,56).

c. RK PPKD merupakan seluruh pengeluaran atau uang yang terealisasi oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dari kas daerah sebesar Rp. 6.737.459.706,00 Dengan demikian ekuitas akhir pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi adalah sebesar Rp. 7.551.067.281,70

B A B VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili dan S O T K

Undang undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan Tegas menjelaskan adanya kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 , tentang susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu. Juga menetapkan uraian tugas Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah tentang penyelenggaraan bidang tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sesuai tugas surat Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 , tentang susunan dan tata kerja merupakan pelaksana yang berada dan tanggungjawab langsung kepada Bupati Kapuas Hulu. Beralamat di jalan Adi Sucipto Nomor 2 A Telp. (0567) -21205 Kedamin.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, bidang Perindustrian dan bidang Transmigrasi yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tuags Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;

- b. pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Pemerintahan dibidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2021 Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi terdiri dari

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat;
- 3. Bidang Tenaga Kerja;
- 4. Bidang Transmigrasi;
- 5. Bidang Perindustrian;
- 6. Unit Pelaksanan Teknis (UPT) ; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kepala Dinas :

Kepala Dinas mempunyai Tugas memimpin Kegiatan Pelayanan umum dan teknis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Transmigrasi sesuai dengan kewenangan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi. Untuk Melaksanakan Tugas Kepala Dinas Melaksanakan Fungsi Sebagai Berikut :

- a) Penetapan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- b) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dengan Instansi lainnya;
- c) Penyusunan Kebijakan Teknis penyelenggaraan dibidang Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- d) Pemberian petunjuk Penyelenggaraan Pelayanan Umum dan Teknis sesuai dengan rencana Operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;

- f) Pemantauan, Pengawasan dan Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka pelaksanaan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris, kecuali dengan alasan tertentu.

2) Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan program kerja Sekretariat;
- b) pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- c) pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- g) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum dan Aparatur.

Sub Bagian Program, mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Dinas, dan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
- b) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
- c) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;

- d) penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- e) pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f) pengendalian dan pelaporan program kerja Dinas;
- g) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan administrasi keuangan Dinas, Untuk melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbag Keuangan ;
- b) penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas ;
- c) penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas ;
- d) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas ;
- e) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan ; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Aparatur, mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b) penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- c) penyelenggaraan ketatalaksanaan Dinas;
- d) penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e) pengelolaan barang milik Dinas;
- f) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Tenaga Kerja

Bidang Tenaga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknik di bidang Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas Bidang Tenaga Kerja melaksanakan Fungsi Sebagai berikut :

- a) Penyusunan Rencana Operasional Bidang Tenaga Kerja;
- b) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Tenaga Kerja;
- c) Penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
- d) Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tenaga Kerja secara periodik; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :

- Kelompok Jabatan Fungsional

4) Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Perumusan serta pelaksanaan kebijakan Teknis dibidang Perindustrian. Untuk Melaksanakan tugas, Bidang Perindustrian melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana operasional Bidang Perindustrian;
- b) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perindustrian;
- c) Penyelenggaraan program kegiatan di bidang perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional;
- d) Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian secara periodik; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian terdiri dari :

- Kelompok Jabatan Fungsional

5) Bidang Transmigrasi

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Perumusan serta pelaksanaan dibidang Transmigrasi. Untuk Melaksanakan tugas, Bidang Transmigrasi melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana operasional Bidang Transmigrasi;
- b) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Transmigrasi;
- c) Penyelenggaraan program kegiatan di bidang perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan Kawasan transmigrasi dan pengembangan kawansan transmigrasi;
- d) Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian secara periodik; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Transmigrasi terdiri dari :

- Kelompok Jabatan Fungsional

6) **Unit Pelaksana Teknis**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

7) **Kelompok Jabatan Fungsional**, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya dan melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

B A B VII

P E N U T U P

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, professional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai alat umpan balik (feed back) yang dapat digunakan dalam manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Laporan Keuangan ini menyajikan hasil pelaksanaan perencanaan kinerja keuangan tahun 2023 yang telah dibiayai dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.